

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN
PENDAPATAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

H A N A F I

NIM. 015535698

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**



ABSTRAK

Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah
Kabupaten Belitung Timur

Hanafi

Universitas Terbuka

hanafivannavoei@gmail.com

Kata Kunci : Pendapatan Keuangan Daerah, rasio efektifitas, rasio efisiensi,
Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur dalam kurun waktu 5 tahun yaitu sejak tahun 2005 sampai dengan 2009 dan mengidentifikasi komponen pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dimasa yang akan datang.

Jenis penelitian ini termasuk studi statistika deskriptif yaitu kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan penelitian terhadap suatu objek tertentu, dimana dari data tersebut dianalisis dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah adalah data target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, Total Penerimaan Daerah, serta data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten Belitung Timur selama tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009, selain itu data-data penunjang lainnya yang berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk referensi dan penelitian lainnya juga digunakan dalam penelitian ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio efektifitas pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur selama 5 tahun yaitu tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009 rata-rata sebesar 110,23 persen. Rasio Efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur selama 5 tahun yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 rata-rata sebesar 16,70 persen.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur dilaksanakan secara efektif dan efisien. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dimasa yang akan datang adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan
Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

Penyusun TAPM : Hanafi

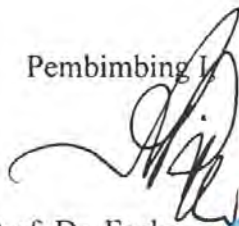
NIM : 015535698

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/tanggal : 07 Oktober 2010

Menyetujui:

Pembimbing I,



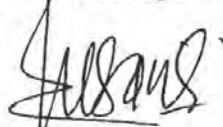
Prof. Dr. Fachrurrozie

Pembimbing II,



Dr. Deetje Sunarsih

Ketua Bidang ISIP



Dra. Susanti, M.Si

NIP. 19671214 199303 2 00 2

Mengetahui



Direktur Program Pascasarjana



Suciati, Ph.D

NIP.1952021319852001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Hanafi
NIM : 015535698
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Tesis : Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan
Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program
Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Minggu/ 12 Desember 2010

Waktu : 08.00 – 10.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji : Dr. Maman Rumanta

Penguji Ahli : Prof. Dr. Ngadisah

Pembimbing I : Prof. Dr. Fachrurrozie

Pembimbing II : Dr. Deetje Sunarsih



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Pangkalpinang, 07 Oktober 2010.

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
FAKES KEMAHAYUAN BANGSA
TGL. 20
DC4AFAAF290203771
KEMAHAYUAN BANGSA
6000
DJP
HANAFI

NIM. 015535698



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur”. Dalam penyusunan penelitian ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan, maka peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Fachrurrozie selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini
2. Dr. Deetje Sunarsih selaku pembimbing II yang telah memberikan saran-saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini
3. Dr. Maman Rumanta Selaku Kepala UPBJJ UT Pangkalpinang
4. Pracilia Damayanti, SE selaku Pengelola Program Pasca Sarjana UPBJJ UT Pangkalpinang
5. Ibu dan Ayah tercinta, Ibu dan Bapak Mertua, dan istriku terkasih yang selalu memberi dukungan, do'a, dan cinta kasih yang tiada putus kepada peneliti
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Pangkalpinang Angkatan 2008.2 yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penyusunan tesis ini. Akhir kata semoga Allah SWT selalu meridhoi langkah-langkah kita dan melindungi kita dengan rahmat dan kasih sayang-Nya

Pangkalpinang, 07 Oktober 2010

Penulis



DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Pernyataan Orisinalitas.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Diagram.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Lampiran.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II KERANGKA TEORITIK.....	 10
A. Keuangan Daerah.....	10
B. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	13
C. Sumber-sumber Keuangan Daerah.....	18
D. Model Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah.....	22
E. Jenis Rasio Berdasarkan Data yang Bersumber dari APBD.....	26
F. Penelitian Sebelumnya.....	33
G. Ringkasan Tinjauan Pustaka.....	35
H. Kerangka Berfikir.....	37
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian dan sumber data.....	38
C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional.....	39
D. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A.	Dimensi sejarah berdirinya Kabupaten Belitung Timur dari perspektif potensi sumber pendapatan asli daerah.....	46
B.	Efektifitas Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	51
C.	Efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	71
D.	Potensi Pajak Daerah.....	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	107
A.	Kesimpulan.....	107
B.	Saran.....	108
	DAFTAR PUSTAKA.....	110
	LAMPIRAN	

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model <i>Value For Money</i>	23
Gambar 2.2 Model FEE.....	24
Gambar 2.3 Model Kerangka Berfikir.....	37

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Ringkasan realisasi APBD Kab. Belitung Timur 2005-2009.....	7
Tabel 2.1	Pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah.....	28
Tabel 4.1	Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah TA.2005.....	52
Tabel 4.2	Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah TA.2006.....	55
Tabel 4.3	Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah TA.2007.....	59
Tabel 4.4	Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah TA.2008.....	63
Tabel 4.5	Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah TA.2009.....	67
Tabel 4.6	Rincian komponen pajak daerah dan retribusi daerah.....	73
Tabel 4.7	Rincian program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD.	75
Tabel 4.8	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2005.....	76
Tabel 4.9	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2006.....	76
Tabel 4.10	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2007.....	77
Tabel 4.11	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2008.....	78
Tabel 4.12	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2009.....	79
Tabel 4.13	Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD TA.2009-2009.....	80
Tabel 4.14	Rasio efisiensi pengelolaan PAD TA. 2005-2009.....	81

Tabel 4.15	Rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2005.....	83
Tabel 4.16	Rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2006.....	84
Tabel 4.17	Rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2007.....	85
Tabel 4.18	Rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2008.....	86
Tabel 4.19	Rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2009.....	87
Tabel 4.20	Kompilasi rasio efektifitas dan kontribusi pajak daerah TA.2005-2009.....	88
Tabel 4.21	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak hotel.....	90
Tabel 4.22	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak hotel Tahun Anggaran 2010-2014.....	91
Tabel 4.23	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak restoran.....	91
Tabel 4.24	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak restoran Tahun Anggaran 2010-2014.....	92
Tabel 4.25	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak hiburan.....	93
Tabel 4.26	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak hiburan Tahun Anggaran 2010-2014.....	94
Tabel 4.27	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak reklame.....	94
Tabel 4.28	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak reklame Tahun Anggaran 2010-2014.....	95
Tabel 4.29	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak penerangan jalan raya.....	96
Tabel 4.30	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak penerangan jalan raya Tahun Anggaran 2010-2014.....	97
Tabel 4.31	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak galian C.....	97
Tabel 4.32	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak galian C Tahun Anggaran 2010-2014.....	98
Tabel 4.33	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak parkir.....	99
Tabel 4.34	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak parkir Tahun Anggaran 2010-2014.....	100

Tabel 4.35	Trend rasio efektifitas dan kontribusi pajak pengelolaan sarang burung walet.....	100
Tabel 4.36	Proyeksi rasio efektifitas dan kontribusi pajak pengelolaan sarang burung walet Tahun Anggaran 2010-2014.....	102
Tabel 4.37	Kompilasi proyeksi rasio efektifitas dan rasio kontribusi pajak daerah Tahun Anggaran 2010-2014.....	103
Tabel 4.38	Perbandingan proyeksi rasio efektifitas dan rasio kontribusi pajak daerah.....	104
Tabel 4.39	Jumlah hotel di Kabupaten Belitung Timur.....	105
Tabel 4.40	Jumlah restoran di Kabupaten Belitung Timur.....	105
Tabel 4.41	Jumlah perusahaan di Kabupaten Belitung Timur.....	106

UNIVERSITAS TERBUKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rincian objek Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Lampiran 2. Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2006
- Lampiran 3. Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2007
- Lampiran 4. Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2008
- Lampiran 5. Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2009
- Lampiran 6. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2005
- Lampiran 7. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2006
- Lampiran 8. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2007

Lampiran 9. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2008

Lampiran 10. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009

Lampiran 11. Surat Ijin Penelitian

Lampiran 12. Berita Acara peninjauan lapangan tim terpadu dalam rangka pembentukan calon daerah otonom Kabupaten Belitang Timur

UNIVERSITAS TERBUKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang salah satu bagian di dalamnya adalah desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kebijakan pemberian otonomi kepada daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal.

Pertama, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia yang berupa ancaman terjadinya disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia.

Kedua, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan serta kewenangan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*task assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan pada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal.

Berkenaan dengan desentralisasi fiskal tersebut ada tiga pilihan. Pertama, memberikan seluruh basis pajak kepada daerah kemudian mewajibkannya untuk menyekor sebagian dari hasil pajak tersebut kepada tingkat pemerintah yang lebih tinggi untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Kedua, merupakan kebalikan dari pilihan pertama, yaitu seluruh kewenangan perpajakan berada pada pemerintah pusat yang kemudian membiayai pemerintah daerah dengan sistem hibah atau transfer, baik melalui bagi hasil seluruh penerima maupun melalui bagi hasil penerimaan pajak-pajak tertentu. Ketiga, merupakan kombinasi dari pilihan satu dan dua, yaitu memberi beberapa kewenangan pemungutan pajak kepada daerah.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah dapat dikelompokkan menjadi dua hal yaitu pengelolaan penerimaan dan pengeluaran.

Pengelolaan penerimaan keuangan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi keuangan daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, peran pemerintah daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah pusat semata, akan tetapi berperan penting untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat diartikan bahwa setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama, dan kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah. Pemberian otonomi dan desentralisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintah daerah yang pada akhirnya bermuara pada terciptanya *good governance*.

Salah satu komponen vital dari *good governance* dan desentralisasi adalah akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik dapat diartikan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sejalan dengan tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik, maka diperlukan reformasi di beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah yakni reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*), reformasi sistem pembiayaan (*financing*

reform), reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*), reformasi sistem pengauditan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta pembaruan sistem manajemen keuangan daerah.

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa dipenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal sesuai dengan bunyi pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan:

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana maksud pada ayat (2)

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan sosial masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dapat dikatakan bahwa dari sisi aspek legalitas formal pengelolaan keuangan publik telah ditetapkan prosedur dan sistem pengendalian manajemen yang memadai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan kelengkapan paket Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka analisis kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerah dapat dilakukan yang salah satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pemilihan Kabupaten Belitung Timur untuk menjadi objek penelitian didasarkan pada data bahwa kabupaten ini memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi, artinya daerah yang bersangkutan mampu melaksanakan seluruh tugas-tugas pemerintah di daerahnya termasuk menggaji pegawai yang sudah dilimpahkan dari pusat kepada daerah. Belitung Timur memiliki

potensi sumber daya yang cukup memadai untuk membiayai jalannya pemerintahan yang berasal dari sektor kelautan, perkebunan, dan sektor pertambangan.

Berdasarkan data laporan keuangan tahun anggaran 2009 diketahui bahwa kontribusi sektor pertambangan, khususnya Pajak Galian C pada tahun 2009 mencapai Rp.6,77 miliar. Realisasi total pajak daerah tahun 2009 berjumlah Rp.8 miliar. Informasi tersebut menandai bahwa Pajak Galian C memberikan kontribusi sebesar 84,71 persen dari total pajak daerah.

Tabel 1.1 menginformasikan bahwa realisasi pendapatan APBD Kabupaten Belitung Timur untuk kurun waktu tahun anggaran 2005-2008 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dari yang awalnya senilai Rp.20,44 miliar pada tahun anggaran 2005 meningkat menjadi Rp.35,21 miliar pada tahun 2008. Selain itu, peningkatan realisasi pendapatan keuangan daerah tersebut juga disebabkan semakin bertambahnya Pendapatan Transfer dari yang awalnya senilai Rp.109,47 miliar pada tahun anggaran 2005 meningkat menjadi Rp.334,36 miliar pada tahun 2008 serta adanya peningkatan pendapatan dari komponen Lain-lain Pendapatan yang sah.

Realisasi pendapatan APBD tahun anggaran 2009 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pendapatan tersebut tidak serasi dengan jumlah belanja yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga mengakibatkan defisit APBD tahun anggaran 2009 senilai Rp.29,26 miliar. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai

pertanyaan tentang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur. Apakah kebijakan keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan segala potensi daerah. Apakah capaian target realisasi penerimaan keuangan daerah telah sesuai dengan yang telah dianggarkan sebelumnya.

Tabel 1.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Belitung Timur 2005-2009
(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009
I. Pendapatan	132,83	255,88	315,36	375,94	363,16
a. PAD	20,48	24,97	31,91	35,21	33,93
b. Pendapatan Transfer	109,47	230,70	281,61	334,36	327,74
c. Lain-lain Pendapatan	2,87	0,19	1,82	6,36	1,48
II. Belanja	95,00	186,83	230,89	320,01	381,50
a. Belanja Operasi	61,36	104,77	121,38	170,40	232,73
b. Belanja Modal	33,64	82,06	108,58	149,60	148,77
c. Belanja tak terduga	-	-	0,92	-	-
III. Transfer ke desa	6,43	11,41	16,30	17,21	10,92
IV. Pembiayaan	24,35	53,52	101,30	154,14	171,80
a. Penerimaan	25,35	57,84	111,53	169,49	194,36
b. Pengeluaran	1,00	4,32	10,22	15,35	22,55

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh

Widodo berjudul Analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali. Tujuan Penelitian yang dilakukan Widodo tersebut adalah untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, apakah pemerintah yang bertugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Berdasarkan data APBD dan hasil penelitian Widodo serta guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah, maka pengelolaan pendapatan keuangan daerah menjadi penting untuk dipelajari lebih lanjut.

Sangat penting bagi suatu daerah untuk bisa meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerahnya. Apabila efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak optimal, dapat dipastikan akan menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan penelitian tentang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah. Upaya ini dapat bermanfaat untuk penetapan anggaran yang sesuai dengan potensi yang mendekati kondisi nyata di daerah serta menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial untuk dikembangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan teliti adalah:

1. Bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Komponen apakah dalam Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah pada masa yang akan datang

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur
2. Menganalisis efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur
3. Menganalisis komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah pada masa yang akan datang

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak yang ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.



BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Keuangan Daerah

Salah satu aspek pemerintahan daerah yang harus dikelola secara hati-hati adalah aspek pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya bertujuan menjamin tersedianya keuangan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalan potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Menurut Memesah dalam Halim (2007;23) berpendapat bahwa Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat 5, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mardiasmo (2002;48) berpendapat bahwa secara garis besar, manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien. Oleh sebab itu, dalam upaya pemberdayaan pemerintahan daerah, konsep mendasar yang harus dipahami dalam pengelolaan keuangan dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja, dan anggaran multi-tahunan.
7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta memudahkan mendapat informasi.

B. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Devas (1989;58) pengelolaan keuangan berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Accountability*, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Lembaga tersebut termasuk pemerintah pusat, DPRD, kepala daerah dan masyarakat umum. Unsur penting dalam *accountability* adalah keabsahan dan pengawasan.
2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan mengurangi kesempatan pegawai untuk berbuat curang.
4. Hasil guna (*effectiveness*) dan daya guna (*efficiency*). Pengurusan keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
5. Pengendalian. Petugas keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan dapat tercapai.

Menurut Munir (2004;62), untuk mengelola keuangan daerah diperlukan optimalisasi anggaran yang ekonomis, efisien dan efektif atau *Value for Money Concept*. Ekonomis merupakan ukuran penggunaan dana

masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Efisien merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal. Efektif merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik.

Konsep *Value for Money* akan memberikan manfaat seperti:

1. Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik
5. Meningkatkan *public cost awareness* sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, konsep *Value for Money* merupakan jembatan menuju *good governance*, yaitu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel. Bentuk pengelolaan dana masyarakat yang berdasarkan konsep *Value for Money* adalah pengelolaan yang berorientasi pada kinerja. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintah daerah dan program kerja yang dibutuhkan suatu tingkat pelayanan publik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh unit kerja menjadi syarat penentu alokasi dana.

Menurut Munir (2004;68), pengukuran *Value for Money* atas keuangan daerah dapat dirinci menurut indikator sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi merupakan ukuran relatif dalam suatu organisasi pemerintah. Apakah belanja yang dikeluarkan lebih besar dari pada yang sesungguhnya diperlukan ? Apakah pengeluaran organisasi lebih besar daripada pengeluaran organisasi sejenis lainnya ?

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio output/keluaran dan input/masukan sekunder atau pengeluaran. Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Pengeluaran sebagai penyebut dalam bentuk satuan mata uang. Output sebagai pembilang dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik.

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik. Dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik. Efektifitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga efektifitas hanya berpengaruh dengan keluaran.

Dipandang dari perspektif masyarakat sebagai pengguna layanan publik, pencapaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai meningkatnya kualitas layanan publik dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk membayar kewajibannya melalui pajak dan retribusi daerah.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolok ukur dalam:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2002:127), penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta.

Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

DPRD dapat diartikan sebagai sebuah lembaga atau entitas yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan mengelola laporan keuangan daerah.

2. Badan eksekutif

Badan eksekutif merupakan badan penyelenggara pemerintahan yang menerima otorisasi pengelolaan keuangan daerah dari DPRD, seperti Gubernur, Bupati, Walikota, serta pimpinan unit Pemerintah Daerah lainnya.

3. Badan pengawas keuangan

Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang termasuk dalam badan ini adalah Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Investor, kreditor dan donatur

Badan atau organisasi baik pemerintah, lembaga keuangan maupun lainnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah daerah.

5. Analis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah

Yaitu pihak-pihak yang menaruh perhatian atas aktifitas yang dilakukan Pemerintah Daerah, seperti lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti dan lain-lain.

6. Rakyat

Rakyat di sini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian pada aktifitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima produk dan jasa dari pemerintah daerah

7. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggungjawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.

C. Sumber-Sumber Keuangan Daerah

Sumber pendanaan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang digali dari wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Mangkoesoebroto (1999;24) berpendapat bahwa pajak (termasuk pajak daerah) adalah suatu pungutan yang merupakan hak pemerintah, di mana pungutan tersebut dapat dipaksakan kepada subjek pajak dan tidak ada balas jasa yang langsung diterima oleh pembayar pajak.

Pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak. Walaupun demikian, Kabupaten/Kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang memadai. Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
- 2) Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
- 3) Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 4) Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Retribusi Daerah

Mangkoesebroto (1999;35) berpendapat bahwa retribusi adalah pungutan pemerintah kepada masyarakat karena masyarakat menerima jasa tertentu dari pemerintah. Berdasarkan obyeknya retribusi daerah dapat digolongkan menjadi:

- 1) Retribusi Jasa Umum, merupakan retribusi atas jasa pemerintah daerah yang telah memberikan jasa pelayanan umum kepada orang pribadi atau badan usaha tertentu.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, dapat dikenakan atas harta yang dimiliki oleh daerah namun belum dimanfaatkan secara penuh sehingga harta tersebut dimanfaatkan oleh pihak swasta, maka pihak swasta dapat dikenakan retribusi.
- 3) Retribusi Perijinan Tertentu, merupakan retribusi atas perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Selain dari komponen pendapatan asli daerah tersebut di atas, pemerintah daerah juga memperoleh PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Menurut Simanjuntak (2002;44), transfer dari pusat ke daerah masih perlu dilakukan dengan beberapa alasan antara lain untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal. Pemerintah Pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) utama negara. Transfer dibutuhkan juga untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horizontal. Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung pada kondisi daerah bersangkutan, memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Pendapatan transfer tersebut meliputi:

- a. Transfer pemerintah pusat-dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
- b. Transfer pemerintah pusat-lainnya yang terdiri dari dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.
- c. Transfer pemerintah provinsi yang terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil lainnya, pendapatan transfer pemerintah provinsi lainnya.

3. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan yang sah antara lain pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Model Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

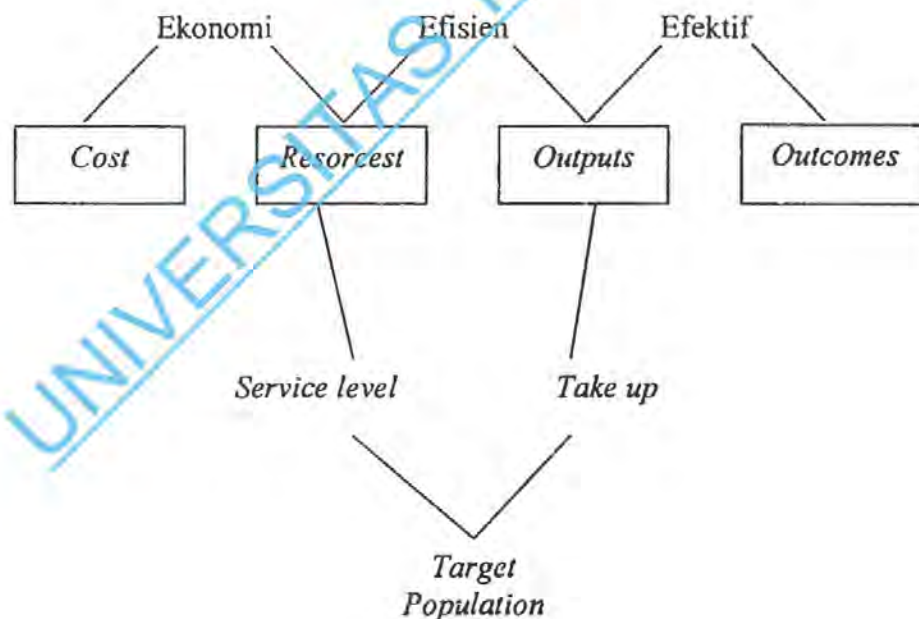
Fokus pengukuran kinerja pada awalnya adalah pada pengukuran tingkat efisiensi. Hal tersebut berhubungan erat dengan obyek pembahasan pada awalnya yakni pengukuran kinerja kegiatan usaha swasta. Ketika kesadaran para pengambil kebijakan muncul bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya juga dapat diukur efisiensi dan efektifitasnya, maka pembahasan yang intensif mengenai pengukuran kinerja pemerintah dimulai.

Masalah muncul ketika disadari bahwa untuk pelayanan publik banyak sekali hal-hal yang bersifat kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pendekatan yang lebih spesifik untuk dapat mengukur kinerja pemerintah. Data yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah ada yang bersifat kuantitatif seperti laporan keuangan atau laporan anggaran yang relatif lebih mudah untuk diukur kinerjanya secara langsung. Akan tetapi pengukuran aspek-aspek kualitatif seperti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan data kualitatif lainnya tidak bisa diukur kinerjanya secara langsung.

Memahami keterbatasan di atas, perkembangan lebih lanjut dari cara pengukuran kinerja adalah ditemukannya konsep pengukuran kinerja atas dasar *Value for Money*. Pada prinsipnya konsep ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan pada tiga hal yaitu Ekonomi, Efisien, dan Efektif.

1. Model *Value For Money* (3E)

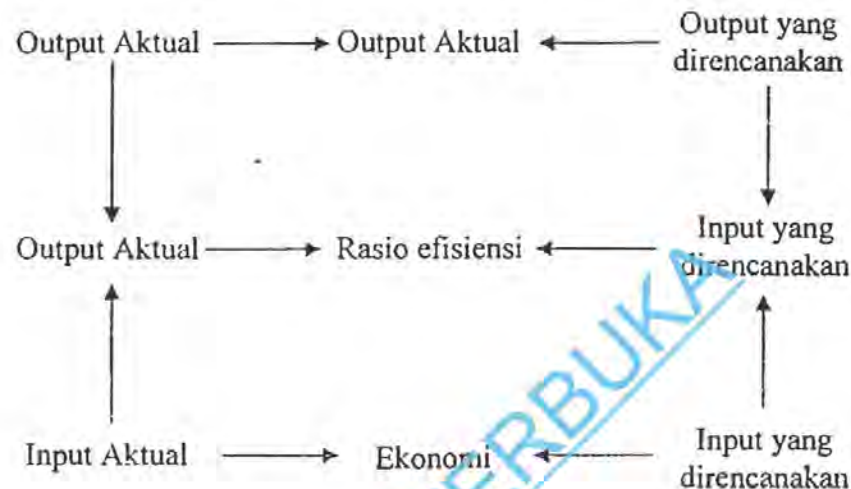
Irvine Lapsley dalam Jane (2002;66) menekankan pengukuran kinerja pemerintahan dengan mendasarkan kepada *Value for Money* (3E). Pokok bahasan utama dari *Value for Money* ada tiga, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Ekonomi berkaitan dengan biaya terkecil untuk menghasilkan output organisasi. Efisiensi ditentukan oleh output terbaik dengan biaya tertentu atau output tertentu dengan biaya terendah. Ada dua macam output yakni output yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Sedangkan efektifitas berkaitan dengan penyediaan jasa dengan baik. Model *Value for Money* dapat digambarkan melalui gambar berikut.



Gambar 2.1
Model *Value for Money*

2. Model FEE

Stewart dalam Jane (2002;68) menawarkan sebuah model pengukuran berdasarkan analisis varian sebagaimana tergambar dalam gambar berikut.



Gambar 2.2
Model FEE)

Model ini membandingkan input dan output yang direncanakan dengan input dan output aktual. Ekonomi adalah hubungan antara input pada harga pasar dengan harga input aktual. Dengan kata lain, ekonomi adalah peringkat pembelian barang dan jasa pada kualitas yang diinginkan dan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Efisiensi adalah hubungan antara input dan output aktual dengan input dan output yang direncanakan. Efisiensi merupakan ukuran seberapa jauh penggunaan barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi untuk mencapai output tertentu. Efektifitas adalah hubungan antara output dengan tujuan.

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana output, kebijakan, dan prosedur organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Model Mayston

Mayston dan Jesson dalam Jane (2002;70) memberikan konsep/model pengukuran kinerja berdasarkan prinsip pengukuran nilai tambah (*value added*). Mayston menjelaskan bahwa *outcomes* dari suatu program dalam sebuah organisasi (misalnya organisasi di sektor pendidikan) akan sangat luas cakupannya. Untuk dapat memberikan penilaian efektifitas dari kinerja diperlukan komparasi antarorganisasi yang sejenis. Komparasi tersebut harus dapat memperhitungkan variabilitas input yang dimiliki oleh masing-masing organisasi. Komparasi yang tepat adalah yang berdasarkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh organisasi kepada perkembangan anggota organisasi tersebut.

Pengukuran kinerja ini mencontohkan keberhasilan nilai ujian yang dicapai oleh siswa. Seberapa besar nilai yang dicapai siswa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang secara langsung berada dalam kendali organisasi sekolah. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menerapkan suatu metode pengukuran *outcomes* pada masing-masing sekolah. Selanjutnya mengadopsi metode pengukuran *outcomes* terbaik dari suatu sekolah untuk diterapkan pada sekolah-sekolah yang kurang baik, sehingga akan diperoleh pengukuran yang seragam secara nasional.

E. Jenis Rasio Berdasarkan Data yang Bersumber dari APBD

Menurut Halim (2007;231), rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1. Rasio Kemandirian

Gambaran citra kemandirian daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui berapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Upaya nyata dalam mengukur tingkat kemandirian yaitu dengan membandingkan besarnya realisasi PAD dengan total pendapatan daerah

$$\text{Tingkat Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

(Sumber : Halim 2007)

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula.

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini

akan menimbulkan perbedaan. Ada 4 macam pola yang memperkenalkan hubungan situasional yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antara lain:

- a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang belum mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap mulai mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu (mandiri) dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian suatu daerah. Pola hubungan daerah dengan tingkat kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

(Sumber : Halim 2007)

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan perbandingan antara kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times \text{Target}$$

(Sumber : Halim 2007)

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien, apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah semakin baik.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan meskipun Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, mengingat keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

(Sumber : Halim 2007)

Pendapat lain yang dapat digunakan untuk mengukur rasio keuangan daerah adalah yang dikemukakan oleh Munir (2004;73). Menurutnya, pengukuran efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan melalui:

1. Analisis Efektifitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio antara realisasi pendapatan dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, untuk mengetahui berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan anggaran.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

(Sumber : Munir, 2004)

2. Analisis pertumbuhan yaitu menghitung pertumbuhan APBD meliputi sisi penerimaan dan pengeluaran dengan rumus :

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

(Sumber : Munir, 2004)

Diketahui : P_o = Realisasi anggaran tahun $n-1$

P_n = Realisasi anggaran tahun n

3. Analisis Proporsi/Kontribusi, untuk mengetahui sumbangan atau peranan yang diberikan oleh masing-masing komponen. Analisis ini juga berfungsi untuk mengetahui derajat otonomi fiskal, kemampuan rutin daerah dan upaya fiskal. Analisis ini dapat digunakan untuk setiap komponen APBD terhadap total APBD atau total komponen APBD atau terhadap PDRB, rumusnya adalah sebagai berikut

$$\text{Kontribusi realisasi} = \frac{\text{Realisasi komponen}}{\text{Total realisasi}} \times 100\%$$

(Sumber : Munir, 2004)

Selain menggunakan parameter rasio keuangan pemerintah daerah yang telah dikemukakan di atas, analisis pengelolaan keuangan daerah juga dapat menggunakan analisis kinerja keuangan yang telah dikembangkan oleh Musgrave, Richard A dan B. Musgrave, Peggy (1993). Namun dalam penerapannya, parameter disesuaikan dengan komponen dalam APBD yaitu:

1. Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan milik daerah serta pendapatan lain-lain yang sah.

Total Penerimaan Daerah merupakan jumlah dari seluruh penerimaan dalam satu tahun anggaran.

2. Upaya fiskal antara lain adalah Total Anggaran Pendapatan Asli Daerah, merupakan target besarnya pajak daerah yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan berdasarkan kemampuan rasional yang dapat dicapai.
3. Kemandirian/kemampuan pembiayaan. Parameter yang digunakan adalah:

$$\frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja Rutin Non Belanja Pegawai}}$$

Belanja Rutin Non Belanja Pegawai merupakan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok pelayanan masyarakat yang terdiri dari belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas, pengeluaran tidak termasuk bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka serta belanja lain-lain.

$$\frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}$$

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. Efisiensi penggunaan anggaran (kinerja anggaran) adalah :

$$\frac{\text{Total Sisa Anggaran}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Sisa anggaran (sisa perhitungan anggaran) merupakan selisih lebih antara penerimaan daerah atas belanja yang dikeluarkan dalam satu tahun anggaran ditambah selisih lebih transaksi pembiayaan penerimaan dan pengeluaran, yaitu :

$$\frac{\text{Total Pengeluaran Lainnya}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Pengeluaran lainnya merupakan pengeluaran yang berasal dari pengeluaran tidak termasuk bagian lain ditambah dengan pengeluaran tidak tersangka yang direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Total Belanja Daerah merupakan jumlah keseluruhan pengeluaran daerah dalam satu tahun anggaran yang membebani anggaran daerah.

Dari ulasan di atas, diketahui bahwa penilaian efektifitas pengelolaan keuangan daerah tercermin dalam APBD yaitu dengan menggunakan analisis perbandingan antar elemen APBD dalam bentuk rasio maupun pertumbuhan elemen-elemennya. Peningkatan dan penurunan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Faktor sumber daya baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta keuangan.
2. Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan baik struktural maupun fungsional.
3. Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan
4. Faktor dukungan kepada aparatur
5. Faktor kepemimpinan dalam arti mengkombinasikan keempat faktor tersebut untuk mencapai sasaran.

F. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah merupakan hal penting untuk diketahui. Penelitian tersebut menggunakan berbagai alat analisis rasio keuangan yang telah dikemukakan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Widodo tentang Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali dengan menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi serta *Debt Service Coverage Ratio*. Dari penelitian yang dilakukan oleh Widodo diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam APBD.
2. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat relatif rendah dan bahkan cenderung turun yaitu dari 16,65 persen pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69 persen pada tahun anggaran 2000.
3. Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Boyolali masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata mencapai 80 persen dari total pendapatan yang diterima.
4. Aktivitas penyerapan dana untuk belanja pembangunan masih terkonsentrasi pada triwulan IV yaitu sebesar 72,96 persen dari total anggaran pembangunan.

5. Secara potensial apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi kebutuhan belanjanya, Kabupaten Boyolali memiliki kesempatan untuk melakukan pinjaman. Hal ini karena pada tahun anggaran 2000 mempunyai DSCR sebesar 11,89, dan pada tahun 2001, menurut penelitian Tim dari LPEM UI, Kabupaten Boyolali dapat melakukan pinjaman dengan maksimum pokok angsuran pinjaman sebesar Rp. 15,055 miliar.

Insukindro dkk dalam Munir (2004;75) membahas mengenai pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa peran retribusi daerah lebih dominan dalam menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah dalam APBD rendah karena upaya merealisasikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak didasarkan potensi Pendapatan Asli Daerah tetapi hanya ditargetkan berdasarkan tahun sebelumnya.

Kuncoro dalam Munir (2004;81) mengamati masalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan di 27 provinsi selama 1984/1985-1990/1991. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi elemen APBD tersebut menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat sangat tinggi.

Daud dalam Munir (2004;88) melakukan penelitian tentang efektifitas dan efisiensi pajak hotel dan restoran dalam peningkatan PAD di Kabupaten Kendari. Dalam penelitian tersebut, alat analisis yang digunakan adalah rasio pertumbuhan pajak hotel dan restoran, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pajak dan PAD, rasio efisiensi dan rasio efektifitas.

Armayani dalam Munir (2004;92) melakukan penelitian tentang analisis anggaran belanja pembangunan Kabupaten Wajo tahun 1995 hingga tahun 1999. dalam penelitiannya untuk melihat perkembangan APBD digunakan analisis pertumbuhan. Selanjutnya untuk melihat proporsi anggaran pada masing-masing sektor pembangunan, digunakan analisis proporsional/ kontribusi. Proporsi anggaran yang dialokasikan ke setiap sektor pembangunan dibandingkan struktur perekonomian daerah menunjukkan efektifitas alokasi anggaran belanja pembangunan.

Dari berbagai hasil penelitian tersebut di atas, sudah tentu terdapat persamaan yang tidak mungkin dapat hindari dalam penelitian ini. Namun ada beberapa aspek yang membedakan dalam penelitian ini, seperti daerah penelitian, periode penelitian, obyek penelitian, dan alat analisis. Selain itu juga belum ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Belitang Timur.

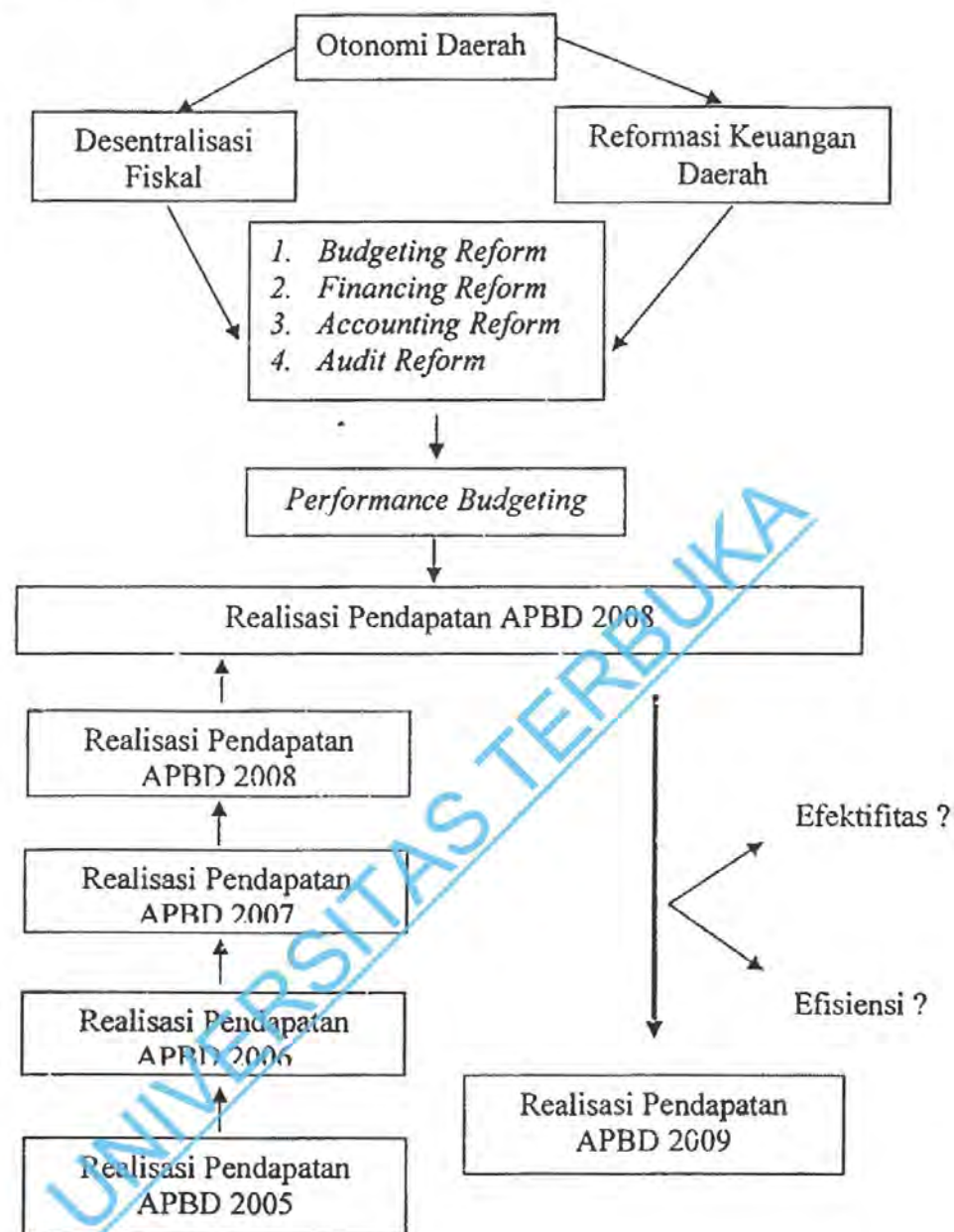
G. Ringkasan Tinjauan Pustaka

Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam APBD. Konsep yang cukup relevan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan yang dikembangkan oleh Munir (2004) dan Halim (2007). Alasan pemilihan konsep Munir dan Halim dalam penelitian ini adalah karena konsep yang digunakan lebih mudah untuk diukur secara langsung.

Data awal yang digunakan untuk proses analisis bersifat kuantitatif yang berasal dari laporan keuangan pemerintah daerah..

Selanjutnya metode penelitian yang dilakukan menggunakan beberapa alat analisis diantaranya (a) Analisis Efektifitas yaitu dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD, (b) Analisis Efisiensi yaitu dengan menggunakan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD, (c) Analisis Proporsi/Kontribusi yaitu untuk mengetahui sumbangan atau peranan yang diberikan oleh masing-masing komponen dalam APBD, (d) Analisis Trend untuk mengetahui proyeksi di masa yang akan datang.

H. Kerangka Berfikir



Gambar 2.3
Model Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Metode penelitian sejarah bukanlah hanya berarti penelitian sejarah yang biasa digunakan oleh para pakar sejarah untuk mengkaji masa lalu. Dalam hal ini, penggunaan metode sejarah yang sangat menggantungkan pada data-data yang terdapat di masa lalu, seperti dokumen, buku harian, tokoh sejarah, relik atau koran-koran kuno.

Kualitas penelitian sejarah sangat tergantung pada kualitas sumber data. Semakin otentik sumber data, maka semakin baik hasilnya. Dengan memahami apa yang terjadi di masa lalu ini, peneliti berharap dapat menemukan suatu pola atau benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dengan pola ini, arah masa depan diharapkan dapat diramalkan.

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Data yang digunakan adalah :

- a. Data sejarah berdirinya Kabupaten Belitung Timur
- b. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

- c. Realisasi Penerimaan PAD dan Target Penerimaan PAD tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- d. Data Statistik Kabupaten Belitung Timur tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah parasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Data sekunder yang diteliti, antara lain data sejarah berdirinya Kabupaten Belitung Timur, Laporan Keuangan Kabupaten Belitung Timur, Buku Kabupaten Belitung Timur dalam angka, target PAD, realisasi PAD, biaya untuk memungut PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Data tersebut diperoleh dari DPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

C. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

1. Definisi Konsep

a. Efisiensi

Efisiensi berhubungan erat dengan produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses pelayanan publik dapat dikatakan efisien apabila suatu layanan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

b. Efektifitas

Efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan pelayanan publik dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

2. Definisi Operasional.

a. Efisiensi

Efisiensi dalam penelitian ini berhubungan erat dengan pengelolaan pendapatan asli daerah. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan penerimaan PAD dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan PAD semakin baik.

Dalam konteks peningkatan pelayanan publik, dapat diartikan bahwa Proses pelayanan publik dapat dikatakan efisien apabila suatu layanan atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya (uang, waktu, SDM) yang serendah-rendahnya.

b. Efektifitas :

Efektifitas dalam penelitian ini berhubungan erat dengan pencapaian target pendapatan keuangan yang ditetapkan. Efektifitas

pengelolaan pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dibandingkan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Pengelolaan pendapatan keuangan daerah dikategorikan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah termasuk menggali potensi daerah yang semakin baik.

Dalam konteks peningkatan pelayanan publik, dapat diartikan bahwa Proses Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan pelayanan publik dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

D. Teknik Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama dalam rumusan masalah, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Munir (2004) yaitu :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efektifitas adalah:

- a. Membuat tabel target anggaran dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

- b. Mengidentifikasi target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
 - c. Membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing komponen pada setiap tahun anggaran.
 - d. Menganalisis hasil perhitungan rasio efektifitas penerimaan keuangan daerah
2. Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Halim (2007) yaitu :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efisiensi adalah:

- a. Menghimpun data keuangan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki unsur PAD.
- b. Menghimpun data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Membuat tabel realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- d. Mengidentifikasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dan realisasi

penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.

- e. Membandingkan realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dengan realisasi penerimaan PAD yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran.
 - f. Menganalisis hasil perhitungan rasio efisiensi penerimaan PAD
3. Untuk menjawab permasalahan ketiga yaitu menemukan komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang, penulis menggunakan teknik analisis rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang dikemukakan oleh Munir (2004) dan perkiraan kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan kontribusi pada tahun-tahun mendatang untuk masing-masing komponen Pajak Daerah dengan metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil.

Teknik analisis rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang dikemukakan oleh Munir (2004), yaitu :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Komponen Pajak Daerah}}{\text{Anggaran Komponen Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Efektifitas Pajak Daerah adalah:

- a. Membuat tabel target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen Pajak Daerah tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

- b. Mengidentifikasi target anggaran dan realisasi anggaran untuk masing-masing komponen Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- c. Membandingkan realisasi anggaran dengan target anggaran yang ditetapkan untuk masing-masing komponen Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- d. Menganalisis hasil perhitungan rasio efektifitas untuk masing-masing komponen Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Selanjutnya menggunakan analisis rasio kontribusi. Rasio ini digunakan untuk menentukan komponen-komponen Pajak Daerah yang memberikan kontribusi besar dan strategis untuk dikembangkan dalam meningkatkan penerimaan PAD di masa yang akan datang.

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi komponen Pajak Daerah}}{\text{Total Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Langkah-langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Kontribusi adalah:

- a. Membuat tabel rincian realisasi komponen Pajak Daerah dan total realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.
- b. Membandingkan realisasi masing-masing komponen Pajak Daerah dengan total realisasi penerimaan Pajak Daerah untuk masing-masing tahun anggaran.

- c. Menganalisis hasil perhitungan rasio kontribusi untuk masing-masing komponen Pajak Daerah untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009.

Selanjutnya dilakukan perkiraan kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan kontribusi pada tahun-tahun mendatang untuk masing-masing komponen Pajak Daerah. Perkiraan tersebut dilakukan menggunakan metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil dengan rumus $Y' = a + bX$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

keterangan :

Y' = Perkembangan Rasio Efektifitas/Kontribusi

Y = Variabel Rasio Efektifitas/Kontribusi.

a = Besarnya Y saat $X=0$

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Waktu

Analisis terakhir untuk mengidentifikasi komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah dengan melakukan pengelompokkan komponen Pajak Daerah yang memiliki proyeksi pertumbuhan rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang positif untuk dipilih sebagai komponen Pajak Daerah yang potensial dikembangkan di masa yang akan datang.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Belitung Timur sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 serta menganalisis komponen Pajak Daerah yang potensial dikembangkan di masa yang akan datang. Jenis penelitian ini termasuk studi statistik deskriptif yaitu kegiatan mengumpulkan, mengolah dan kemudian menyajikan hasil penelitian tentang suatu objek tertentu, setelah data dianalisis dan ditarik kesimpulan. Data yang dibutuhkan dalam analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah adalah data Target Pendapatan Asli Daerah, Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, serta data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Kabupaten Belitung Timur sejak tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009. Untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan keuangan daerah tersebut, digunakan analisis rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

A Dimensi Sejarah berdirinya Kabupaten Belitung Timur dari perspektif Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Belitung Timur dibentuk dengan undang-undang nomor 05 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keinginan masyarakat yang disertai adanya dorongan politik adalah faktor utama

pembentukan Kabupaten Belitung Timur. Defriyanto (2005;42) mengemukakan beberapa alasan yang mendasari keinginan untuk pemekaran daerah di Kabupaten Belitung diantaranya:

- 1) Tuntutan masyarakat di tingkat bawah untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik dari pemerintah daerah, yakni melalui semakin pendeknya birokrasi dengan rentang kendali yang harus dilalui dalam memperoleh jasa publik.
- 2) Keinginan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri Sumber daya alam dan potensi yang dimilikinya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Meningkatkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri untuk meningkatkan pelayanan publik.
- 4) Dukungan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini terdapat peluang besar untuk pembentukan daerah kabupaten baru apabila memenuhi berbagai persyaratan.

Tuntutan masyarakat untuk memekarkan Daerah Kabupaten Belitung menjadi dua daerah kabupaten diwujudkan dalam pernyataan sikap mendukung dari berbagai elemen masyarakat, yaitu:

- 1) Dukungan dan pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Politik, antara lain: Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan, dan Partai Bulan Bintang (PBB);

- 2) Pernyataan sikap dari beberapa Badan Perwakilan Desa, Kecamatan Manggar, Kelapa Kampit, Gantung dan Dendang;
- 3) Persetujuan dari berbagai organisasi masyarakat, lembaga adat, dan organisasi profesi, seperti; Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Lembaga Adat Kenegerian, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Koperasi Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat untuk pembentukan dan pemekaran daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

- 1) Tanggal 12 Nopember 2001 telah dilaksanakan Seminar Pemekaran Kabupaten Belitung dengan Tema “Penelitian Aspek-aspek Strategis Pemekaran Kabupaten Belitung Dalam Kerangka Otonomi Daerah”, yang dilaksanakan di Kecamatan Manggar.
- 2) Tanggal 18 Januari 2002 Rapat Paripurna Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Daerah dan diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 06 Tahun 2002 tanggal 26 Januari 2002 tentang Pemekaran Daerah.
- 3) Pada tanggal 7 Maret 2002 dikeluarkan Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 061 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Belitung.

- 4) Pada tanggal 9 Maret 2002 dikeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Pemekaran Kabupaten Belitung.
- 5) Diterbitkannya Keputusan Bupati Belitung Nomor 001605/KPTS/I/2002 tanggal 9 Maret 2002 tentang Pembentukan Tim Penelitian Awal Pemekaran Daerah Kabupaten Belitung, dan dilanjutkan: Rapat Koordinasi Tim tanggal 16 Maret 2002 dalam rangka pengumpulan data sebagai usulan Pemekaran Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- 6) Surat Bupati Belitung Nomor 001604/I/2002 tanggal 9 Maret 2002 perihal Usulan Pemekaran Daerah Kabupaten Belitung dan Nomor 001633/I/2002 tanggal 19 Maret 2002 perihal Berkas Usulan Pemekaran Daerah Kabupaten Belitung.
- 7) Rapat Koordinasi Tim Pemekaran Kabupaten dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 27 Maret 2002 di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

Langkah teknis selanjutnya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah menugaskan Tim Terpadu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) untuk melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 25 sampai dengan 27 Juli 2002 yang menghasilkan sebelas poin hasil temuan lapangan.

Dari perspektif pengelolaan keuangan daerah, hasil temuan tim terpadu DPOD menginformasikan bahwa secara umum dalam tiga tahun terakhir perhitungan APBD Kabupaten Belitung (2000 s.d 2002), terlihat

bahwa proporsi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan dari 12,08 persen pada tahun anggaran 2000 menjadi 10,78 persen pada tahun anggaran 2002, sementara proporsi transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari 67,96 persen pada tahun anggaran 2000 menjadi 80,31 pada tahun 2002.

Potensi ekonomi utama yang diandalkan oleh calon Kabupaten Belitung Timur adalah pertambangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, serta pariwisata. Guna meningkatkan kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, DPOP merekomendasikan agar pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah seperti efektifitas perpajakan dan retribusi daerah.

Selanjutnya dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 25 Februari 2003, dan diundangkannya oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 25 Februari 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan undang-undang inilah terbentuk Kabupaten Belitung Timur sebagai daerah otonom Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pada awal terbentuknya Kabupaten Belitung Timur adalah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 1 tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2003. Penyusunan anggaran penerimaan pada tahun 2003 tidak menetapkan target anggaran Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 100 juta Rupiah.

B Efektifitas Pengelolaan Pendapatan daerah

Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran dibandingkan target anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Untuk menentukan efektif tidaknya pengelolaan keuangan daerah digunakan asumsi sebagai berikut:

1. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin besar terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan semakin efektif.
2. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi anggaran) semakin kecil terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut (target anggaran) maka dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak efektif.

Pengelolaan pendapatan keuangan daerah dikategorikan efektif apabila rasio efektifitas yang dicapai minimal 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah termasuk menggali potensi daerah

yang semakin baik. Beberapa komponen pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur dapat diukur rasio efektifitasnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Rasio Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2005

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH	-		
Pendapatan Pajak Daerah	5.709.650.934,00	5.556.474.742,00	97,32
Pendapatan Retribusi Daerah	1.018.040.800,00	1.128.955.791,00	110,89
Lain-lain PAD yang sah	11.770.361.000,00	13.802.726.899,00	117,27
Total Pendapatan Asli Daerah	18.498.052.734,00	20.488.157.432,00	110,76
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	2.899.992.891,00	11.542.937.155,00	398,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.721.852.709,00	14.421.960.421,00	214,55
Dana Alokasi Umum	63.902.000.000,00	63.902.000.000,00	100
Dana Alokasi Khusus	9.311.220.000,00	9.311.220.000,00	100
Dana Penyesuaian	2.816.490.000,00	2.816.490.000,00	100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.127.587.903,00	5.079.118.890,00	99,05
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100
Total Pendapatan Transfer	93.179.143.503,00	109.473.726.466,00	117,49
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	-	2.870.162.920,00	
JUMLAH PENDAPATAN	111.677.196.237,00	132.832.046.818,00	118,94

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2005, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2005 mencapai 110,76 persen. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100 persen. Capaian tertinggi adalah dari komponen Lain-lain PAD yang Sah yang mencapai nilai 117,27 persen dan capaian terendah pada komponen Pendapatan Pajak Daerah yang hanya mencapai 97,32 persen. Kondisi ini bisa disebabkan karena pada tahun 2005 Kabupaten Belitung Timur baru mulai berdiri sehingga belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target Pajak Daerah.

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2005 mencapai 117,49 persen. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100 persen. Capaian tertinggi adalah dari komponen Dana Bagi Hasil Pajak yang mencapai 398 persen dan capaian terendah pada komponen Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang merupakan transfer bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi hanya mencapai 99,05 persen. Kondisi ini bisa disebabkan pada tahun 2005 tidak terdapat kantor UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung Timur.

Fakta tersebut secara nyata menunjukkan belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target Pendapatan Bagi Hasil Pajak di Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2005, masyarakat Belitung Timur yang melaksanakan kewajiban membayar pajak yang merupakan hak pemerintah provinsi berupa Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan tidak dapat dilayani di wilayah administratif Belitung Timur. Masyarakat melaksanakan kewajiban pajak tersebut di wilayah Kabupaten Belitung yang mengakibatkan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak bagi Kabupaten Belitung. Dana Penyesuaian senilai Rp.2.816.490.000,00 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor T 094/353/BAKU tanggal 8 Juni 2005 tentang Bantuan Pelaksanaan Pilkada.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Pendapatan Keuangan dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2005 mencapai Rp. 2,8 miliar. Realisasi pendapatan tersebut adalah dari komponen Pendapatan Hibah.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun anggaran 2005, semestinya pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai dapat merumuskan anggaran yang lebih efektif untuk tahun selanjutnya dengan melakukan pendekatan

anggaran berbasis kinerja. Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2006 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Rasio Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2006

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	7.066.664.990,00	5.334.773.566,35	75,49
Pendapatan Retribusi Daerah	1.434.491.500,00	1.279.683,25	89,21
Lain-lain PAD yang sah	15.448.385.000,00	18.361.207.613,83	118,86
Total Pendapatan Asli Daerah	23.949.541.490,00	24.975.664.260,63	104,28
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	8.740.977.675,00	14.735.040.603,00	168,57
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.191.570.000,00	15.423.821.597,00	188,29
Dana Alokasi Umum	157.854.000.000,00	157.854.000.000,00	100
Dana Alokasi Khusus	28.810.000.000,00	28.870.000.000,00	100,21
Dana Penyesuaian	2.749.000.000,00	2.749.000.000,00	100
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.599.000.000,00	7.353.909.083,69	159,90
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	4.694.586.000,00	3.720.900.600,00	79,26
Total Pendapatan Transfer	215.639.133.675,00	230.706.671.883,69	106,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	-	199.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	239.588.675.165,00	255.881.336.144,32	106,80

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen

anggaran pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2006, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2006 mencapai 104,28 persen. Meskipun nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100 persen, namun perlu diketahui bahwa kondisi tersebut mengisyaratkan terjadinya penurunan rasio efektifitas senilai 6,48 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tertinggi adalah dari komponen Lain-lain PAD yang Sah yang mencapai 118,86 persen dan capaian terendah pada komponen Pendapatan Pajak Daerah yang hanya mencapai 75,49 persen.

Kondisi di atas bisa disebabkan karena pada tahun 2006 Kabupaten Belitung Timur belum memiliki sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target Pajak Daerah. Rasio efektifitas yang rendah tersebut juga bisa disebabkan penetapan anggaran yang terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi pajak daerah yang sesungguhnya. Sebuah keputusan yang kurang tepat bila pemerintah Kabupaten Belitung Timur meningkatkan nilai anggaran Pendapatan Pajak Daerah tanpa terlebih dahulu mengukur potensi pajak daerah yang mendekati kondisi yang sesungguhnya, menganalisis data historis capaian efektifitas realisasi anggaran, serta upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai target tersebut.

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2006 mencapai 106,99 persen. Meskipun nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena lebih dari 100 persen, namun perlu diketahui bahwa kondisi tersebut mengisyaratkan terjadinya penurunan rasio efektifitas senilai 10,50 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tertinggi adalah dari komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari bagi hasil Sumber Daya Hutan, Pertambangan Umum, Perikanan dan Minyak Bumi yang mencapai 188,29 persen dan capaian terendah pada komponen Pendapatan Bagi Hasil Lainnya yang hanya mencapai 79,26 persen. Kondisi ini bisa disebabkan karena komponen Pendapatan Bagi Hasil Lainnya baru pertama kali dianggarkan dalam APBD.

Tahun 2006 dibentuk kantor UPTD Dinas Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Belitung Timur sehingga telah tersedia sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Masyarakat Belitung Timur dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak yang merupakan hak pemerintah provinsi berupa Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Kabupaten Belitung Timur yang secara simultan mengakibatkan peningkatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kabupaten Belitung Timur.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Pendapatan Keuangan Daerah dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2006 mencapai Rp.199 juta atau mengalami penurunan senilai 2,67 miliar dari tahun sebelumnya. Fakta yang mesti dicermati adalah tidak dianggarkannya komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam APBD tahun 2006. Kondisi tersebut merupakan kondisi yang ironis mengingat realisasi anggaran untuk komponen anggaran yang sama pada tahun 2005 mencapai Rp.2,8 miliar. Capaian tersebut adalah dari komponen Pendapatan Hibah.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebaiknya mengevaluasi secara mendalam aspek efektifitas pengelolaan pendapatan daerah dengan menggunakan data realisasi anggaran tahun 2005 dan 2006. Benang merah yang dapat dijadikan bahan evaluasi adalah fakta bahwa secara nominal telah terjadi peningkatan realisasi pendapatan APBD dari tahun 2005 senilai Rp.132 miliar menjadi Rp.255 miliar pada tahun 2006. Di sisi lain, peningkatan jumlah penerimaan pendapatan tersebut berbanding terbalik dengan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah yang semakin menurun dari tahun 2005 senilai 118,94 persen menjadi 106,80 persen pada tahun 2006.

Berdasarkan data historis realisasi APBD tahun anggaran 2005 dan 2006, semestinya pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai dapat merumuskan anggaran yang lebih efektif untuk tahun selanjutnya dengan melakukan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Rasio efektifitas

pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2007 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Rasio Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2007

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	7.652.000.000,00	6.133.374.625,02	80,15
Pendapatan Retribusi Daerah	2.976.198.000,00	2.820.929.609,75	94,76
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan investasi lainnya	150.000.000,00	440.210.854,78	293,47
Lain-lain PAD yang sah	18.013.300.000,00	22.525.190.083,85	125,04
Total Pendapatan Asli Daerah	28.791.498.000,00	31.919.705.173,40	110,86
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	12.537.362.800,00	19.186.647.691,00	153,03
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	12.799.425.700,00	27.019.332.068,00	211,09
Dana Alokasi Umum	192.853.000.000,00	192.953.000.000,00	100
Dana Alokasi Khusus	34.907.000.000,00	34.907.000.000,00	100
Dana Penyesuaian	-	704.652.000,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.155.000.000,00	6.948.356.975,19	134,78
Total Pendapatan Transfer	258.251.788.500,00	281.618.988.734,19	109,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Lainnya	2.000.000.000,00	1.659.673.000,00	82,98
Pendapatan Hibah	-	164.343.500,00	-
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.000.000.000,00	1.824.016.500,00	91,20
JUMLAH PENDAPATAN	289.043.286.500,00	315.362.710.407,59	109,10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitong Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, dapat dijelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2007, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2007 mencapai 110,86 persen. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen dan disertai peningkatan rasio efektifitas sebesar 6,58 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahun pertama terjadinya peningkatan nominal penerimaan PAD yang disertai dengan peningkatan rasio efektifitas. Capaian rasio tertinggi adalah dari komponen Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya yang mencapai nilai 293,47 persen dan capaian rasio efektifitas terendah untuk ketiga kalinya masih terdapat pada komponen Pendapatan Pajak Daerah yang hanya mencapai 80,15 persen.

Pencapaian rasio efektifitas komponen pendapatan pajak daerah yang rendah ini semakin membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur membutuhkan adanya perubahan kebijakan daerah dalam bentuk langkah-langkah strategis pada aspek pengelolaan pajak daerah agar mampu mencapai target penerimaan pajak daerah secara lebih efektif di masa yang akan datang. Perlu dilakukan sebuah analisis mengenai potensi pajak daerah yang mendekati kondisi yang sesungguhnya, menganalisis data historis capaian efektifitas realisasi

anggaran tahun-tahun sebelumnya, serta upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk mencapai target tersebut.

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2007 mencapai 109,04 persen. Nilai tersebut dapat dikatakan efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen dan disertai peningkatan rasio efektifitas sebesar 2,05 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahun pertama terjadinya peningkatan nominal penerimaan Pendapatan Transfer yang disertai dengan peningkatan rasio efektifitas. Capaian tertinggi adalah dari komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang terdiri dari bagi hasil Sumber Daya Hutan, Pertambangan Umum, Perikanan dan Minyak Bumi yang mencapai 211,09 persen. Capaian tertinggi tersebut merupakan capaian tertinggi untuk tahun kedua yang berasal dari komponen Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang pada tahun 2006 lalu mencapai 138,29 persen. Capaian rasio terendah terdapat pada dua komponen yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang masing-masing mencapai target 100 persen.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pencapaian target Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2007 mencapai 91,20 persen. Realisasi Pendapatan Keuangan Daerah dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2007 mencapai Rp.1,82 miliar atau mengalami peningkatan senilai Rp.1,62 miliar dari tahun sebelumnya.

Tahun 2007 merupakan kali pertama komponen Lain-lain pendapatan yang Sah dimasukkan dalam anggaran setelah dua tahun sebelumnya tidak dianggarkan dalam APBD tahun 2005 dan 2006. Pendapatan bagi hasil lainnya dalam komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan dana bantuan Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 188.44/2100/V/2007 tanggal 28 Mei 2007 tentang Pemberian Bantuan untuk Biaya Program Pembangunan Kepada Kabupaten/Kota. Fakta ini merupakan perubahan yang positif dari aspek penyusunan anggaran.

Data realisasi APBD tahun anggaran 2007 menggambarkan adanya sebuah perubahan positif bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan pendapatan keuangan daerah secara keseluruhan. Tahun ini merupakan tahun pertama terjadinya peningkatan nominal pendapatan keuangan daerah yang disertai dengan peningkatan rasio efektifitas. Perubahan signifikan yang dapat dijadikan poin positif yakni fakta bahwa adanya penetapan anggaran untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah dalam struktur APBD tahun 2007.

Berdasarkan data historis realisasi APBD tahun 2007 di atas, semestinya pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai melaksanakan anggaran lebih efektif untuk tahun selanjutnya. Rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2008 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Rasio Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2008

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	6.959.745.500,00	8.042.586.286,00	115,56
Pendapatan Retribusi Daerah	3.229.850.000,00	4.385.333.527,50	135,78
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	150.000.000,00	990.627.565,28	660,42
Lain-lain PAD yang sah	20.052.800.000,00	21.797.368.996,31	108,70
Total Pendapatan Asli Daerah	30.392.395.500,00	35.215.915.375,09	115,87
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	18.694.320.000,00	20.778.729.867,00	111,15
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.971.540.000,00	42.089.939.114,00	168,55
Dana Alokasi Umum	220.654.060.000,00	220.654.060.000,00	100
Dana Alokasi Khusus	40.623.000.000,00	40.623.000.000,00	100
Dana Penyesuaian	-	744.055.000,00	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.355.000.000,00	9.471.481.668,85	176,87
Total Pendapatan Transfer	310.297.920.000,00	334.361.264.649,85	107,75
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	2.693.320.000,00	4.874.121.300,00	180,97
Pendapatan Lainnya	1.537.750.000,00	1.495.871.000,00	97,28
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.231.070.000,00	6.369.992.300,00	150,55
JUMLAH PENDAPATAN	344.921.385.500,00	375.947.173.324,94	109

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Informasi pada tabel tersebut menjelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan daerah untuk masing-masing komponen anggaran pendapatan

keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2008, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2008 mencapai 115,87 persen. Nilai tersebut sangat efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen dan disertai peningkatan rasio efektifitas sebesar 5,01 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahun kedua terjadinya peningkatan nominal penerimaan PAD senilai Rp.190 miliar yang disertai dengan peningkatan rasio efektifitas. Capaian rasio tertinggi adalah dari komponen Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya yang mencapai nilai 660,42 persen. Tingginya capaian rasio efektifitas dari komponen Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi lainnya tidak dapat disebut sebagai sebuah perubahan yang positif mengingat anggaran yang ditetapkan sangat rendah sehingga target anggaran mudah dicapai (*under-estimate*). Penilaian ini didasarkan pada data yang menjelaskan bahwa anggaran 2008 tidak sebanding atau masih sangat rendah yaitu senilai Rp.150 juta bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp.440,21 juta. Capaian rasio efektifitas terendah tidak lagi terdapat pada komponen Pendapatan Pajak Daerah melainkan pada komponen Lain-lain PAD yang Sah dengan rasio yang mencapai 108,70 persen.

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2008 mencapai 107,75 persen. Nilai tersebut cukup efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen namun tidak disertai peningkatan rasio efektifitas dari tahun sebelumnya. Capaian tertinggi adalah dari komponen Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi yang mencapai 176,87 persen. Capaian tertinggi tersebut merupakan capaian tertinggi untuk pertama kali terjadi yang berasal dari komponen Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Capaian rasio terendah masih terdapat pada dua komponen yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang masing-masing mencapai target 100 persen.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan yang Sah

Capaian target Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun anggaran 2008 mengalami perubahan yang sangat signifikan yakni mencapai 150,55 persen. Realisasi Pendapatan Keuangan dari komponen anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2008 mencapai Rp.6,36 miliar atau mengalami peningkatan senilai Rp.4,54 miliar dari tahun sebelumnya. Realisasi anggaran Pendapatan Hibah pada Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penambahan pendapatan Hibah yang salah satunya berasal dari pembangunan Gedung dan Bangunan Ruang Rawat Inap VIP pada RSUD sebesar Rp.1,35 miliar dengan BAP No.01 sampai dengan 11/BA/R.VIP/2008 dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.247 juta

dengan BAP No. 07, 08,10/BAP/R.VIP/2008 dan PL.03.02.VI.1 tahun 2008.

Pendapatan lainnya pada Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan dana bantuan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur nomor 188.44/666/DPPKAD/2008 tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.1,49 miliar.

Data realisasi APBD tahun anggaran 2008 menggambarkan adanya sebuah perubahan positif bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan penerimaan daerah secara keseluruhan. Tahun ini merupakan tahun kedua terjadinya peningkatan nominal penerimaan daerah yang disertai dengan peningkatan rasio efektivitas. Perubahan signifikan yang dapat dijadikan poin positif yakni fakta Realisasi Pendapatan Keuangan dari anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur pada tahun anggaran 2008 mencapai Rp.6,36 miliar atau mengalami peningkatan senilai Rp.4,54 miliar dari tahun sebelumnya. Adanya penetapan anggaran untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang sah dalam struktur APBD tahun 2007 dan 2008 merupakan langkah penting dan strategis dalam penyusunan anggaran untuk tahun-tahun selanjutnya.

Berdasarkan data historis realisasi APBD tahun 2008 di atas, semestinya pemerintah Kabupaten Belitung Timur mulai dapat melaksanakan anggaran lebih efektif untuk tahun selanjutnya. Rasio Efektivitas pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5
Rasio Efektifitas pengelolaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2009

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	RASIO
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	7.236.010.100,00	8.002.514.954,00	110,59
Pendapatan Retribusi Daerah	2.905.203.150,00	4.529.243.253,00	155,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	900.000.000,00	1.913.957.185,82	212,66
Lain-lain PAD yang sah	16.913.367.076,50	19.485.682.707,47	115,21
Total Pendapatan Asli Daerah	27.954.580.326,50	33.931.398.100,29	121,38
PENDAPATAN TRANSFER			
Dana Bagi Hasil Pajak	15.532.600.000,00	25.093.095.890,00	161,55
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.916.430.000,00	30.558.284.429,00	122,64
Dana Alokasi Umum	218.123.874.000,00	218.123.874.000,00	100
Dana Alokasi Khusus	38.289.000.000,00	38.289.000.000,00	100
Dana Penyesuaian	1.970.341.000,00	5.534.266.000,00	280,88
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	2.512.539.841,40	10.148.911.622,91	106,69
Total Pendapatan Transfer	308.344.784.841,40	327.747.431.941,91	106,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Lainnya	2.086.950.000,00	1.484.079.000,00	71,11
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.086.950.000,00	1.484.079.000,00	71,11
JUMLAH PENDAPATAN	338.386.315.167,90	363.162.909.042,20	107,32

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Informasi pada tabel tersebut menjelaskan rasio efektifitas pengelolaan pendapatan keuangan daerah untuk masing-masing komponen anggaran

pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009, yaitu:

1. Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Fakta yang signifikan untuk dicermati yang terjadi pada APBD tahun 2009 adalah adanya fenomena penurunan target anggaran dan realisasi penerimaan keuangan daerah dalam APBD. Pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2009 mencapai 121,38 persen atau meningkat sebesar 5,51 persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen dan disertai peningkatan rasio efektifitas sebesar 5,51 persen dari tahun sebelumnya.

Capaian rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah tersebut berbanding negatif dengan adanya penurunan anggaran PAD dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahun pertama terjadinya penurunan target total anggaran penerimaan PAD dengan nilai yang cukup signifikan yakni sebesar Rp.2,43 miliar dan penurunan realisasi PAD senilai Rp.1,28 miliar dari tahun sebelumnya. Capaian rasio tertinggi adalah dari komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang mencapai nilai 212,6 persen. Pendapatan tersebut diperoleh dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD yang telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank Sumselbabel. Capaian rasio efektifitas terendah terdapat pada komponen Pendapatan Pajak Daerah dengan capaian rasio sebesar 110,59 persen.

Fakta terjadinya penurunan target dan capaian anggaran PAD dalam APBD tahun 2009 salah satunya mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem penyusunan anggaran dan pengendalian internal pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu hal yang harus dicermati adalah pengawasan pelaksanaan pemungutan PAD. Tidak tertutup kemungkinan penyebab terjadinya penurunan target dan realisasi anggaran PAD dalam APBD ini disebabkan adanya kebocoran dalam penyetoran PAD ke Rekening Kas Daerah.

2. Efektifitas Pendapatan Transfer

Pencapaian target Pendapatan Transfer Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2009 mencapai 106,29 persen atau menurun sebesar 1,46 persen dari tahun sebelumnya. Nilai tersebut efektif karena memiliki rasio lebih dari 100 persen, namun berbanding terbalik dengan adanya penurunan anggaran Pendapatan Transfer dari tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahun pertama terjadinya penurunan target total anggaran Pendapatan Transfer dengan nilai yang cukup signifikan yakni sebesar Rp.1,95 miliar dan penurunan realisasi Pendapatan Transfer senilai Rp.6,61 miliar.

Capaian tertinggi adalah dari komponen Dana Penyesuaian yang mencapai 176,87 persen yang disertai peningkatan jumlah nominal penerimaan sebesar Rp.4,79 miliar dari tahun sebelumnya. Capaian tertinggi tersebut merupakan capaian tertinggi untuk pertama kali terjadi yang berasal dari komponen Dana Penyesuaian yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilu. Capaian rasio terendah masih terdapat pada

dua komponen yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang masing-masing mencapai target 100 persen.

3. Efektifitas Lain-lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Pendapatan Keuangan Daerah dari komponen anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Belitung Timur tahun anggaran 2009 mencapai Rp.1,48 miliar atau mengalami penurunan senilai Rp.4,88 miliar dari tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang didapat dari laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2009, diketahui bahwa untuk periode tahun ini tidak terdapat penerimaan dari pendapatan Hibah.

Data realisasi APBD tahun anggaran 2009 menggambarkan adanya sebuah perubahan yang signifikan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam pengelolaan penerimaan daerah secara keseluruhan. Tahun ini merupakan tahun pertama terjadinya penurunan pada aspek anggaran, realisasi, dan rasio efektifitas penerimaan daerah.

Mencermati kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur semestinya segera mengambil tindakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan di antaranya dengan melakukan reformasi Pengelolaan APBD, yakni reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*), reformasi sistem pembiayaan (*financing reform*), reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*), reformasi sistem pengauditan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta pembaruan sistem manajemen keuangan daerah.

Seiring dengan tujuan adanya reformasi birokrasi, hakikat efektifitas kinerja pemerintah adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu fakta adanya perubahan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan masyarakat di Kabupaten Belitung Timur dibuktikan dengan adanya jaminan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan PT Askes. Dengan adanya kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Belitung Timur.

C Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah dilakukan dengan mengukur perbandingan antara besarnya realisasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dengan realisasi PAD yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan penerimaan PAD dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD semakin baik.

Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh PAD yang diterimanya. Hal itu perlu dilakukan mengingat meskipun daerah berhasil merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan lebih besar daripada realisasi penerimaan PAD.

Pengumpulan data mengenai realisasi biaya nyata yang dikeluarkan untuk memperoleh PAD tidak mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan

biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan jenis-jenis PAD yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tidak terpusat pada satu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Secara garis besar, komponen PAD di Kabupaten Belitung Timur dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah

Pendapatan Keuangan Daerah dari komponen Pajak Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-Lain PAD yang Sah dikelola oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Pengelolaan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai cakupan fungsi layanan teknis yang dilakukan. Sebagai contoh, retribusi pelayanan izin pertambangan dikelola oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi (DISTAMBEN) Kabupaten Belitung Timur. Rincian objek Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Rincian objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
4.1.1	Pajak Daerah	
4.1.1.01	Pajak Hotel	DPPKAD
4.1.1.02	Pajak Restoran	DPPKAD
4.1.1.03	Pajak Hiburan	DPPKAD
4.1.1.04	Pajak Reklame	DPPKAD
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	DPPKAD
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	DPPKAD
4.1.1.07	Pajak Parkir	DPPKAD
4.1.1.08	Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	DPPKAD
4.1.2	Retribusi Daerah	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DINKES & RSUD
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan/ Askes	DINKES & RSUD
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya Ktr Dan Akte Capil	DINDUKCAPIL
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DPU
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	DISHUB
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	DPPKAD
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
4.1.2.02.01	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	DKP
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	DISPERINDAG KOP
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	DISHUB
4.1.2.02.08	Retribusi Jasa Usaha Tempat Pemotongan Hewan	DISTANHUT
4.1.2.02.14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat Berat Dan Kendaraan Tinja	DPU
4.1.2.02.15	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	DKP
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	BAG. EKBANG
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	BAG. EKBANG
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	DISHUB
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Usaha Di Bidang Perhubungan Darat	DISHUB
4.1.2.03.21	Retribusi Di Bidang Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal	DISPERINDAG KOP
4.1.2.03.22	Retribusi Perizinan Bidang Pertambangan	DISTAMBEN

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitang Timur (Data diolah)

KETERANGAN	:	
BAG.EKBANG	:	Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah
DINKES	:	Dinas Kesehatan
DINDUKCAPIL	:	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
DKP	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
DPU	:	Dinas Pekerjaan Umum
DISTANHUT	:	Dinas Pertanian dan Kehutanan
DISHUB	:	Dinas Perhubungan
DISTAMBEN	:	Dinas Pertambangan dan Energi
DISBUDPAR	:	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DISPERINDAGKOP	:	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi
DPPKAD	:	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah

Pada penelitian ini, pengumpulan data mengenai realisasi biaya pelaksanaan program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dibatasi pada biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan program-program dan kegiatan yang memiliki hubungan erat dalam peningkatan perolehan PAD. Perhitungan biaya pemungutan PAD tidak memasukkan biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan bidang kesehatan. Hal tersebut disebabkan biaya pelayanan kesehatan yang sangat beragam dan kompleks, serta substansi utama pemberian pelayanan kesehatan tidak untuk menghasilkan PAD.

Rincian program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7
Rincian Program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SKPD PELAKSANA
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	DPPKAD
2	Pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	DINDUKCAPIL
3	Pelayanan Persampahan	DPU
4	Pelayanan Pasar	DPPKAD
5	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR)	DISHUB
6	Pembangunan TPI dan Pabrik ES	DKP
7	Pelayanan Terminal	DISHUB
8	Pelayanan Rumah Potong Hewan	DISTANHUT
9	Pelayanan Perhubungan Darat	DISHUB
10	Pelayanan Bidang Industri dan Perdagangan	DISPERINDAGKOP
11	Pelayanan Izin Bidang Pertambangan	DISTAMBEN
12	Pelayanan Penerangan Lampu Jalan	DISTAMBEN
13	Pelayanan Penunjang Pariwisata	DISBUDPAR
14	Penyerahan Modal Saham pada PT. Bank SUMSELBABEL	DPPKAD

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Pengukuran tingkat efisiensi pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Belitung Timur dilakukan dengan cara menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dibandingkan dengan Total Realisasi PAD.

Tabel 4.8
 Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang
 berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2005

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Penyertaan modal saham pada bank sumsel	1.000.000.000,00
2	Program penerangan lampu jalan	
	a. Pengadaan dan Pemasangan PLTS di Sarana Umum Desa Terpencil	49.465.000,00
	b. Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	354.342.000,00
	c. Pemeliharaan dan Penggantian Lampu Jalan	164.630.000,00
TOTAL BIAYA		1.568.437.000,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu prioritas pembangunan infrastruktur pada tahun 2005 adalah bidang energi yang diwujudkan dalam program penerangan lampu jalan dan pengadaan PLTS di sarana umum desa terpencil.

Tabel 4.9
 Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang
 berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2006

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	288.208.710,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	79.660.000,00
3	Program pelayanan persampahan	155.788.000,00
4	Program pelayanan pasar	121.683.600,00
5	Program pelayanan perhubungan darat	146.500.000,00
6	Program pelayanan perijinan perindagkop (SIUP, TDP, TDG dan IUI)	11.000.000,00
7	Program pelayanan penerangan lampu jalan	226.701.000,00
8	Program penunjang pariwisata	457.500.900,00
9	Penyertaan modal saham pada bank sumsel	3.500.000.000,00
TOTAL BIAYA		4.987.042.210,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan upaya peningkatan penerimaan PAD melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan biaya sebesar Rp.118,45 juta. Pengembangan sumber pendapatan asli daerah dari sektor bukan tambang juga mulai dilakukan, salah satunya dari sektor pariwisata dengan melaksanakan kegiatan promosi wisata di berbagai pameran wisata nasional.

Tabel 4.10
Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2007

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	118.450.000,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	82.000.000,00
3	Program pelayanan persampahan	17.910.000,00
4	Program pelayanan pasar	475.190.000,00
5	Program pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR)	251.140.000,00
6	Program pelayanan terminal	301.622.000,00
7	Program pelayanan Rumah Potong Hewan	164.470.000,00
8	Program pelayanan perhubungan darat	911.372.000,00
9	Program pelayanan penerangan lampu jalan	244.682.176,00
10	Program penunjang pariwisata	708.975.000,00
11	Penyertaan modal saham pada bank sumsel	2.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		5.275.811.176,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa salah satu upaya peningkatan penerimaan PAD dilakukan dengan cara melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pengembangan sumber pendapatan asli daerah dari

sektor bukan tambang dilakukan melalui sektor perdagangan, perhubungan, dan pariwisata.

Tabel 4.11
Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2008

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	370.965.650,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	157.205.000,00
3	Program pelayanan persampahan	596.900.000,00
4	Program pelayanan pasar	353.611.700,00
5	Program sewa bangunan	675.422.000,00
6	Program pelayanan terminal	3.549.212,00
7	Program pelayanan Rumah Potong Hewan	949.897.380,00
8	Program pelayanan perhubungan darat	822.377.000,00
9	Program pelayanan penerangan lampu jalan	969.685.650,00
10	Program penunjang pariwisata	74.580.000,00
11	Penyertaan modal saham pada bank samsel	2.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		6.974.193.592,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitang Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pengembangan sumber pendapatan asli daerah dari sektor bukan tambang dilakukan melalui sektor perdagangan, perhubungan, pariwisata, serta pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil. Pemerintah Kabupaten Belitang Timur melakukan upaya peningkatan penerimaan PAD dengan melaksanakan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Tabel 4.12
Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2009

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	540.780.050,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	226.405.000,00
3	Program pelayanan persampahan	19.800.000,00
4	Program pelayanan pengujian kendaraan bermotor (KIR)	38.600.000,00
5	Program pelayanan terminal	7.861.370,00
6	Program pelayanan Rumah Potong Hewan	168.199.000,00
7	Program pelayanan perhubungan darat	75.866.600,00
8	Program pelayanan ijin pertambangan	59.544.050,00
9	Program pelayanan penerangan lampu jalan	329.523.100,00
10	Program penunjang pariwisata	174.220.000,00
11	Penyertaan modal saham pada bank sumsel	5.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		6.640.799.170,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan penyertaan modal saham pada PT.Bank Sumsel senilai Rp.5 miliar pada tahun 2009. Pengembangan sumber pendapatan asli daerah dari sektor bukan tambang dilakukan melalui sektor perdagangan, perhubungan, pariwisata, serta pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil.

Data yang diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD untuk tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 kemudian dikompilasi dalam suatu tabel. Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.13
Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang
berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2005 – 2009
(dalam jutaan Rupiah)

NO	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD		288,20	118,45	370,96	540,78
2	Program KTP dan Akte Catatan Sipil		79,66	82,00	157,20	226,40
3	Program persampahan		155,78	17,91	596,90	19,80
4	Program pelayanan pasar		121,68	475,19	353,61	
5	Program pengujian kendaraan bermotor (KIR)			251,14		38,60
6	Program sewa bangunan				675,42	
7	Program terminal			301,62	3,54	7,86
8	Program Pelayanan RPH			164,47	949,89	168,19
9	program perhubungan darat		146,50	911,37	822,37	75,86
10	Program perijinan		11,00			
11	program ijin pertambangan					59,54
12	Program penerangan lampu jalan	568,43	226,70	244,68	969,68	329,52
13	Program pariwisata		457,50	708,97	74,58	174,22
14	Penyertaan modal saham	1.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00
TOTAL BIAYA		1.568,43	4.987,04	5.275,81	6.974,19	6.640,79

Sumber data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Langkah selanjutnya yang mesti dilakukan untuk menilai rasio efisiensi penerimaan PAD adalah dengan membandingkan data yang diperoleh dari total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009, kemudian dikompilasi untuk dibandingkan dengan realisasi PAD dalam suatu tabel.

Tabel 4.14
Rasio efisiensi pengelolaan PAD Tahun Anggaran 2005-2009

Tahun Anggaran	Biaya Perolehan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2005	1.568.437.000,00	20.488.157.432,00	7,66
2006	4.987.042.210,00	24.975.664.260,63	19,97
2007	5.275.811.176,00	31.919.705.173,40	16,53
2008	6.974.193.592,00	35.215.916.375,09	19,80
2009	6.640.799.170,00	33.931.398.100,29	19,57

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Tabel 4.14 menunjukkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dari aspek perolehan Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan baik, karena rasio efisiensinya berkisar antara 19,97 persen sampai dengan 7,66 persen. Kecuali tahun anggaran 2007, berdasarkan data historis tersebut diketahui bahwa rasio efisiensi pengelolaan PAD Kabupaten Belitung Timur pada periode empat tahun terakhir mempunyai kecendrungan yang relatif stabil. Hal ini terlihat dari persentasenya yang setiap tahun berada pada kisaran 19 persen. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima Kabupaten Belitung Timur lebih besar dibandingkan dengan total biaya

yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Pembangunan di Kabupaten Belitung Timur tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan pulau-pulau kecil untuk mengatasi kesenjangan kualitas layanan publik. Dipandang dari kepentingan masyarakat sebagai penerima jasa layanan publik, perubahan yang signifikan terkait efisiensi pelayanan masyarakat diantaranya pelayanan publik yang dirasakan oleh masyarakat di daerah pulau-pulau terpencil di wilayah Kabupaten Belitung Timur. Contoh nyata adalah dengan adanya pembangunan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan gedung SMP Negeri 6 Manggar di Pulau Buku Limau, maka pelayanan yang diterima masyarakat dapat dinikmati dengan lebih cepat dan murah.

D Potensi Pajak Daerah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang adalah menggunakan teknik analisis rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang dikemukakan oleh Munir (2004) dan perkiraan kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan kontribusi pada tahun-tahun mendatang untuk masing-masing komponen Pajak Daerah dengan metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil.

1. Rasio Kontribusi dan Rasio Efektifitas Pajak Daerah

Teknik analisis rasio kontribusi dan rasio efektifitas yang dikemukakan oleh Munir (2004) yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi komponen PAD}}{\text{Total Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.15
Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2005

Uraian	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Rasio (dalam persen)	
	Realisasi	Anggaran	Efektifitas	Kontribusi
Pajak Hotel	11,42	10,70	106,73	0,21
Pajak Restoran	32,22	31,74	101,51	0,58
Pajak Hiburan	62,62	44,76	139,90	1,13
Pajak Reklame	13,69	14,60	93,77	0,25
Pajak Penerangan Jalan Raya	608,88	678,00	89,81	10,96
Pajak Galian C	4.819,14	4.923,43	97,88	86,73
Pajak Parkir	2,35	1,10	213,64	0,04
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	6,12	5,25	116,57	0,11
Jumlah Pajak Daerah	5.556,47	5.709,65	97,32	100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitang Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar 97,32 persen. Nilai tersebut tidak efektif karena kurang dari 100 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi adalah komponen Pajak Parkir yang mencapai nilai 213,64 persen dan capaian terendah pada komponen Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Raya yang hanya mencapai 89,81 persen. Kondisi ini bisa disebabkan karena pada tahun 2005 Kabupaten Belitang Timur baru mulai berdiri sehingga belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk pencapaian target Pajak Daerah.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah tertinggi adalah komponen Pajak Galian C yang mencapai 86,73 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Parkir yang hanya mencapai 0,04 persen. Pajak Galian C memberikan kontribusi utama dalam realisasi Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4,81 miliar.

Tabel 4.16
Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2006

Uraian	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Rasio (dalam persen)	
	Realisasi	Anggaran	Efektifitas	Kontribusi
Pajak Hotel	21,17	29,38	72,06	0,40
Pajak Restoran	47,25	48,63	97,16	0,89
Pajak Hiburan	141,07	14,34	189,76	2,64
Pajak Reklame	39,34	25,30	168,84	0,74
Pajak Penerangan Jalan Raya	672,00	650,00	103,38	12,60
Pajak Galian C	4.392,30	6.227,49	70,53	82,33
Pajak Parkir	13,68	6,20	220,65	0,26
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	7,90	7,27	108,67	0,15
Jumlah Pajak Daerah	5.334,77	7.066,66	75,49	100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar 75,49 persen. Nilai tersebut tidak efektif karena kurang dari 100 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi adalah komponen Pajak Parkir yang mencapai nilai 220,65 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Galian C yang hanya mencapai 70,53 persen. Kondisi ini bisa disebabkan penyusunan anggaran yang kurang tepat. Penyusunan anggaran penerimaan Pajak

Daerah yang baik semestinya didasari data potensi pajak yang mendekati kondisi nyata.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah tertinggi adalah komponen Pajak Galian C yang mencapai 82,33 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang hanya mencapai 0,15 persen. Pajak Galian C memberikan kontribusi utama dalam realisasi Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4,39 miliar.

Tabel 4.17
Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2007

Uraian	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Rasio (dalam persen)	
	Realisasi	Anggaran	Efektifitas	Kontribusi
Pajak Hotel	32,90	36,00	91,39	0,54
Pajak Restoran	86,96	115,00	75,62	1,42
Pajak Hiburan	58,23	103,00	56,53	0,95
Pajak Reklame	101,01	102,50	98,55	1,65
Pajak Penerangan Jalan Raya	611,10	800,00	76,39	9,96
Pajak Galian C	5.228,11	6.465,00	80,87	85,24
Pajak Parkir	8,83	15,00	58,87	0,14
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	6,21	15,50	40,06	0,10
Jumlah Pajak Daerah	6.133,37	7.652,00	80,15	100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar 80,15 persen. Nilai tersebut tidak efektif karena kurang dari 100 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi adalah komponen Pajak Reklame yang mencapai nilai 98,55 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang hanya mencapai 40,06 persen. Kondisi ini bisa

disebabkan penyusunan anggaran yang kurang tepat. Penyusunan anggaran penerimaan Pajak Daerah yang baik semestinya didasari data potensi pajak yang mendekati kondisi nyata.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah tertinggi adalah komponen Pajak Galian C yang mencapai 85,24 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang hanya mencapai 0,10 persen. Pajak Galian C memberikan kontribusi utama dalam realisasi Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5,22 miliar.

Tabel 4.18
Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2008

Uraian	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Rasio (dalam persen)	
	Realisasi	Anggaran	Efektifitas	Kontribusi
Pajak Hotel	47,76	40,81	117,03	0,59
Pajak Restoran	102,92	87,91	117,07	1,28
Pajak Hiburan	65,73	108,40	60,64	0,82
Pajak Reklame	132,62	90,26	146,93	1,65
Pajak Penerangan Jalan Raya	744,05	800,00	93,01	9,25
Pajak Galian C	6.932,91	5.801,00	119,51	86,20
Pajak Parkir	6,94	15,30	45,36	0,09
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	9,63	16,05	60,00	0,12
Jumlah Pajak Daerah	8.042,58	6.959,74	115,56	100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar 115,56 persen. Nilai tersebut efektif karena lebih dari 100 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi adalah komponen Pajak Reklame yang mencapai nilai 146,93 persen

dan capaian terendah pada komponen Pajak Parkir yang hanya mencapai 45,36 persen.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah tertinggi adalah komponen Pajak Galian C yang mencapai 86,20 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Parkir yang hanya mencapai 0,09 persen. Pajak Galian C memberikan kontribusi utama dalam realisasi Pajak Daerah

Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6,93 miliar.

Tabel 4.19
Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009

Uraian	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Rasio (dalam persen)	
	Realisasi	Anggaran	Efektifitas	Kontribusi
Pajak Hotel	60,33	40,81	147,83	0,75
Pajak Restoran	115,06	94,50	121,76	1,44
Pajak Hiburan	61,76	114,98	53,71	0,77
Pajak Reklame	119,52	95,03	125,77	1,49
Pajak Penerangan Jalan Raya	850,93	800,00	106,37	10,63
Pajak Galian C	6.779,63	6.060,75	111,86	84,72
Pajak Parkir	8,22	15,00	54,80	0,10
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	7,02	15,55	45,14	0,09
Jumlah Pajak Daerah	8.002,51	7.236,01	110,59	100,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah secara keseluruhan sebesar 110,59 persen. Nilai tersebut efektif karena lebih dari 100 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi adalah komponen Pajak Reklame yang mencapai nilai 125,77 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang hanya mencapai 45,14 persen.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah tertinggi adalah komponen Pajak Galian C yang mencapai 84,72 persen dan capaian terendah pada komponen Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet yang hanya mencapai 0,09 persen. Pajak Galian C memberikan kontribusi utama dalam realisasi Pajak Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi anggaran sebesar Rp.6,77 miliar.

Tabel 4.20
Kompilasi Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2005 - 2009

Uraian	Rasio Efektifitas					Rasio Kontribusi				
	2005	2006	2007	2008	2009	2005	2006	2007	2008	2009
Pajak Hotel	105,7	72,1	91,4	117,0	147,8	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8
Pajak Restoran	101,5	97,2	75,6	117,1	121,8	0,6	0,9	1,4	1,3	1,4
Pajak Hiburan	139,9	189,8	56,5	60,6	52,7	1,1	2,6	1,0	0,8	0,8
Pajak Reklame	93,8	168,8	98,6	146,9	125,8	0,3	0,7	1,7	1,7	1,5
Pajak Penerangan Jalan Raya	89,8	103,4	76,4	93,0	106,4	11,0	12,6	10,0	9,3	10,6
Pajak Galian C	97,9	70,5	80,9	119,5	111,9	86,7	82,3	85,2	86,2	84,7
Pajak Parkir	213,6	220,7	58,9	45,4	54,8	0,0	0,3	0,1	0,1	0,1
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	116,6	108,7	40,1	60,0	45,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Rasio Efektifitas Pajak Daerah yang memiliki pertumbuhan positif adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Galian C. Tabel 4.20 mengisyaratkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet memiliki pertumbuhan yang negatif.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah yang memiliki pertumbuhan positif adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. Tabel 4.20 di atas mengisyaratkan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Raya, Pajak Galian C, Pajak Parkir dan Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet memiliki pertumbuhan yang negatif.

2. Analisis Trend Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah

Selanjutnya dilakukan perkiraan kecendungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi pada tahun-tahun mendatang untuk masing-masing komponen Pajak Daerah. Perkiraan tersebut dilakukan dengan metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil dengan rumus $Y' = a + bX$

Besarnya a dan b dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{N} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

keterangan :

Y' = Perkembangan Rasio Efektifitas/Kontribusi

Y = Variabel Rasio Efektifitas/Kontribusi

a = Besarnya Y saat $X=0$

b = Besarnya Y jika X mengalami perubahan 1 satuan

X = Waktu

Tabel 4.21
Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	106,73	-2	-213,46	4	0,21	-2	-0,42	4
2006	72,06	-1	-72,06	1	0,4	-1	-0,4	1
2007	91,39	0	0	0	0,54	0	0	0
2008	117,03	1	117,03	1	0,59	1	0,59	1
2009	147,83	2	295,66	4	0,75	2	1,5	4
Jumlah	535,04	0	127	10	2,49	0	1,27	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{535,04}{5} = 107$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{127}{10} = 12,7$$

Diketahui bahwa: $Y' = 107 + 12,7 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{2,49}{5} = 0,49$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{1,27}{10} = 0,127$$

Diketahui bahwa: $Y' = 0,49 + 0,127 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Ta
Ang
20
20
20
20
20

Sumb
Daer

rasio
tahun

Tabel 4.25
Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hiburan

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	139,9	-2	-279,8	4	1,13	-2	-2,26	4
2006	189,76	-1	-189,76	1	2,64	-1	-2,64	1
2007	56,53	0	0	0	0,95	0	0	0
2008	60,64	1	60,64	1	0,82	1	0,82	1
2009	53,71	2	107,42	4	0,77	2	1,54	4
Jumlah	500,54	0	-302	10	6,31	0	-2,54	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{500,54}{5} = 100,1$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-302}{10} = -30,2$$

Diketahui bahwa: $Y' = 100,1 + -30,2 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{6,31}{5} = 1,26$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-2,54}{10} = -0,254$$

Diketahui bahwa: $Y' = 1,26 + -0,254 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.26

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi
Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y'=100,1 + -30,2 \times 3$	$Y'=1,26 + -0,254 \times 3$	9,50	0,50
2011	$Y'=100,1 + -30,2 \times 4$	$Y'=1,26 + -0,254 \times 4$	(20,70)	0,24
2012	$Y'=100,1 + -30,2 \times 5$	$Y'=1,26 + -0,254 \times 5$	(50,90)	(0,01)
2013	$Y'=100,1 + -30,2 \times 6$	$Y'=1,26 + -0,254 \times 6$	(81,10)	(0,26)
2014	$Y'=100,1 + -30,2 \times 7$	$Y'=1,26 + -0,254 \times 7$	(111,30)	(0,52)

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Hiburan di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecenderungan mengalami penurunan.

Tabel 4.27

Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Reklame

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	93,77	-2	-187,5	4	0,25	-2	-0,5	4
2006	168,8	-1	-168,8	1	0,74	-1	-0,74	1
2007	93,55	0	0	0	1,65	0	0	0
2008	146,9	1	146,93	1	1,65	1	1,65	1
2009	125,8	2	251,54	4	1,49	2	2,98	4
Jumlah	633,9	0	42	10	5,78	0	3,39	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{633,86}{5} = 126,77$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{42}{10} = 4,2$$

Diketahui bahwa: $Y' = 126,77 + 4,2 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{5,78}{5} = 1,16$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{3,39}{10} = 0,339$$

Diketahui bahwa: $Y' = 1,16 + 0,339 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecenderungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.28

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi
Pajak Reklame Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y' = 126,77 + 4,2 \times 3$	$Y' = 1,16 + 0,339 \times 3$	139,37	2,18
2011	$Y' = 126,77 + 4,2 \times 4$	$Y' = 1,12 + 0,211 \times 4$	143,57	2,52
2012	$Y' = 126,77 + 4,2 \times 5$	$Y' = 1,12 + 0,211 \times 5$	147,77	2,86
2013	$Y' = 126,77 + 4,2 \times 6$	$Y' = 1,12 + 0,211 \times 6$	151,97	3,19
2014	$Y' = 126,77 + 4,2 \times 7$	$Y' = 1,12 + 0,211 \times 7$	156,17	3,53

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Reklame di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecenderungan mengalami peningkatan.

Tabel 4.29
Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Raya

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	89,81	-2	-179,6	4	10,96	-2	-21,92	4
2006	103,4	-1	-103,4	1	12,6	-1	-12,6	1
2007	76,39	0	0	0	9,96	0	0	0
2008	93,01	1	93,01	1	9,25	1	9,25	1
2009	106,4	2	212,74	4	10,63	2	21,26	4
Jumlah	469	0	23	10	53,4	0	-4,01	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitong Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas di cari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{468,96}{5} = 93,79$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{23}{10} = 2,3$$

Diketahui bahwa: $Y' = 93,79 + 2,3 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{53,4}{5} = 10,68$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-4,01}{10} = -0,401$$

Diketahui bahwa: $Y' = 10,68 + -0,401 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecendrungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Penerangan Jalan Raya di

Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.30

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi Pajak Penerangan Jalan Raya Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y' = 93,79 + 2,3 \times 3$	$Y' = 10,68 + -0,40 \times 3$	100,69	9,48
2011	$Y' = 93,79 + 2,3 \times 4$	$Y' = 10,68 + -0,40 \times 4$	102,99	9,08
2012	$Y' = 93,79 + 2,3 \times 5$	$Y' = 10,68 + -0,40 \times 5$	105,29	8,68
2013	$Y' = 93,79 + 2,3 \times 6$	$Y' = 10,68 + -0,40 \times 6$	107,59	8,27
2014	$Y' = 93,79 + 2,3 \times 7$	$Y' = 10,68 + -0,40 \times 7$	109,89	7,87

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektifitas Pajak Penerangan Jalan Raya di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang cenderung mengalami peningkatan dan rasio kontribusi Pajak Penerangan Jalan Raya di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecenderungan mengalami penurunan.

Tabel 4.31

Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Galian C

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	97,88	-2	-195,8	4	86,73	-2	-173,5	4
2006	70,53	-1	-70,53	1	82,33	-1	-82,33	1
2007	80,87	0	0	0	85,24	0	0	0
2008	119,5	1	119,51	1	86,20	1	86,2	1
2009	111,9	2	223,72	4	84,72	2	169,44	4
Jumlah	480,7	0	77	10	425,22	0	-0,15	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{480,65}{5} = 96,13$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{77}{10} = 7,7$$

Diketahui bahwa: $Y' = 96,13 + 7,7 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{425,22}{5} = 85,04$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-0,15}{10} = -0,015$$

Diketahui bahwa: $Y' = 85,04 + -0,015 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecendrungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Galian C di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut

Table 4.32

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi Pajak Galian C Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y' = 96,13 + 7,7 \times 3$	$Y' = 85,04 + -0,015 \times 3$	119,23	85,00
2011	$Y' = 96,13 + 7,7 \times 4$	$Y' = 85,04 + -0,015 \times 4$	126,93	84,98
2012	$Y' = 96,13 + 7,7 \times 5$	$Y' = 85,04 + -0,015 \times 5$	134,63	84,97
2013	$Y' = 96,13 + 7,7 \times 6$	$Y' = 85,04 + -0,015 \times 6$	142,33	84,95
2014	$Y' = 96,13 + 7,7 \times 7$	$Y' = 85,04 + -0,015 \times 7$	150,03	84,94

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektifitas Pajak Galian C di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang cenderung mengalami peningkatan dan rasio kontribusi Pajak Galian C di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecendrungan mengalami penurunan.

Tabel 4.33
Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkir

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	213,6	-2	-427,3	4	0,04	-2	-0,08	4
2006	220,7	-1	-220,7	1	0,26	-1	-0,26	1
2007	58,87	0	0	0	0,14	0	0	0
2008	45,36	1	45,36	1	0,09	1	0,09	1
2009	54,80	2	109,6	4	0,10	2	0,2	4
Jumlah	593,3	0	-493	10	0,63	0	-0,05	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{593,32}{5} = 118,66$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-493}{10} = -49,3$$

Diketahui bahwa: $Y' = 118,66 + -49,3 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{\sum n} = \frac{0,63}{5} = 0,13$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-0,05}{10} = -0,005$$

Diketahui bahwa: $Y' = 0,13 + -0,005 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecendrungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.34

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	- Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y'=118,66 + -49,3 \times 3$	$Y'=0,13 + -0,005 \times 3$	(29,24)	0,12
2011	$Y'=118,66 + -49,3 \times 4$	$Y'=0,13 + -0,005 \times 4$	(18,54)	0,11
2012	$Y'=118,66 + -49,3 \times 5$	$Y'=0,13 + -0,005 \times 5$	(127,84)	0,11
2013	$Y'=118,66 + -49,3 \times 6$	$Y'=0,13 + -0,005 \times 6$	(177,14)	0,10
2014	$Y'=118,66 + -49,3 \times 7$	$Y'=0,13 + -0,005 \times 7$	(226,44)	0,10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecendrungan mengalami penurunan.

Tabel 4.35

Trend Rasio Efektifitas dan Kontribusi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet

Tahun Anggaran	Rasio Efektifitas				Rasio Kontribusi			
	Y	X	XY	X ²	Y	X	XY	X ²
2005	116,6	-2	-233,1	4	0,11	-2	-0,22	4
2006	108,7	-1	-108,7	1	0,15	-1	-0,15	1
2007	40,06	0	0	0	0,10	0	0	0
2008	60	1	60	1	0,12	1	0,12	1
2009	45,14	2	90,28	4	0,09	2	0,18	4
Jumlah	370,4	0	-192	10	0,57	0	-0,07	10

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Nilai a dan b untuk rasio efektifitas dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{370,44}{5} = 74,09$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-192}{10} = -19,2$$

Diketahui bahwa: $Y' = 74,09 + -19,2 X$

Nilai a dan b untuk rasio kontribusi dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{0,57}{5} = 0,11$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{-0,07}{10} = -0,007$$

Diketahui bahwa: $Y' = 0,11 + -0,007 X$

Dari persamaan trend tersebut, maka kecendrungan perubahan rasio efektifitas dan rasio kontribusi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 4.36

Proyeksi Perkembangan Rasio Efektivitas dan Rasio kontribusi
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet
Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Persamaan Trend		Proyeksi	
	Efektifitas	Kontribusi	Efektifitas	Kontribusi
2010	$Y'=74,09 + -19,2 \times 3$	$Y'=0,11 + -0,007 \times 3$	16,49	0,09
2011	$Y'=74,09 + -19,2 \times 4$	$Y'=0,11 + -0,007 \times 4$	(2,71)	0,08
2012	$Y'=74,09 + -19,2 \times 5$	$Y'=0,11 + -0,007 \times 5$	(21,91)	0,08
2013	$Y'=74,09 + -19,2 \times 6$	$Y'=0,11 + -0,007 \times 6$	(41,11)	0,07
2014	$Y'=74,09 + -19,2 \times 7$	$Y'=0,11 + -0,007 \times 7$	(60,31)	0,06

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan rasio efektivitas dan rasio kontribusi Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Belitung Timur untuk tahun-tahun yang akan datang memiliki kecenderungan mengalami penurunan.

Guna memudahkan penilaian proyeksi kecenderungan perubahan dari berbagai pajak daerah yang dianalisis sebelumnya, maka seluruh proyeksi tersebut dikompilasi dalam suatu tabel sebagaimana disajikan pada Tabel 4.37.

Table 4.37

Kompilasi Proyeksi Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2010-2014

Uraian	Proyeksi Rasio Efektifitas					Proyeksi Rasio Kontribusi				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Pajak Hotel	145,10	157,80	170,50	183,20	195,90	0,87	0,99	1,12	1,25	1,37
Pajak Restoran	120,62	126,62	132,62	138,62	144,62	1,75	1,96	2,17	2,38	2,59
Pajak Hiburan	9,50	(20,70)	(50,90)	(81,10)	(111,30)	0,49	0,24	(0,01)	(0,26)	(0,51)
Pajak Reklame	139,37	143,57	147,77	151,97	156,17	2,18	2,52	2,86	3,19	3,53
Pajak Penerangan Jalan Raya	100,69	102,99	105,29	107,59	109,89	9,48	9,08	8,68	8,27	7,87
Pajak Galian C	119,23	126,93	134,63	142,33	150,03	85,0	85,0	85,0	85,0	84,9
Pajak Parkir	(29,24)	(78,54)	(127,8)	(177,1)	(226,4)	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	16,49	(2,71)	(21,11)	(41,11)	(60,31)	0,09	0,08	0,08	0,07	0,06

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan Proyeksi Rasio Efektifitas Pajak Daerah yang memiliki pertumbuhan positif adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Galian C. Tabel 4.35 menginformasikan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet memiliki pertumbuhan yang negatif.

Rasio Kontribusi Pajak Daerah yang memiliki pertumbuhan positif adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame. Tabel 4.35 menginformasikan bahwa Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Raya, Pajak Galian C, Pajak Parkir dan Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet memiliki pertumbuhan yang negatif

Analisis pemilihan komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang dilakukan dengan pemilihan komponen Pajak Daerah yang memiliki proyeksi rasio efektifitas dan rasio kontribusi

yang positif. Komponen Pajak Daerah yang telah dianalisis rasio efektifitas dan kontribusi tersebut kemudian dibandingkan dalam suatu tabel sebagai berikut.

Table 4.38

Perbandingan Proyeksi Rasio Efektifitas dan Rasio kontribusi Pajak Daerah

Uraian	Rasio Efektifitas	Rasio Kontribusi
Pajak Hotel	+	+
Pajak Restoran	+	+
Pajak Hiburan	-	-
Pajak Reklame	+	+
Pajak Penerangan Jalan Raya	+	-
Pajak Galian C	+	-
Pajak Parkir	+	-
Pajak Pengelolaan Sarang Burung walet	-	-

Sumber data : Data primer

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang adalah:

a. Pajak Hotel

Berdasarkan analisis sebelumnya, Pajak Hotel memiliki proyeksi pertumbuhan rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang positif. Proyeksi pertumbuhan positif pada komponen Pajak Hotel juga didukung oleh fakta adanya peningkatan jumlah hotel untuk periode 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.39
Jumlah Hotel di Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Jumlah
2005	3
2006	5
2007	6
2008	7
2009	9

Sumber Data : Belitung Timur dalam Angka 2009

b. Pajak Restoran

Berdasarkan analisis sebelumnya, Pajak Restoran memiliki proyeksi pertumbuhan rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang positif. Proyeksi pertumbuhan positif pada komponen Pajak Restoran juga didukung oleh fakta adanya peningkatan jumlah restoran untuk periode 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.40
Jumlah Restoran di Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Jumlah
2005	15
2006	20
2007	24
2008	30
2009	37

Sumber Data : Belitung Timur dalam Angka 2009

c. Pajak Reklame

Berdasarkan analisis sebelumnya, Pajak Reklame memiliki proyeksi pertumbuhan rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang positif. Proyeksi pertumbuhan positif pada komponen Pajak Reklame

juga didukung oleh fakta adanya peningkatan jumlah Perusahaan untuk periode 5 tahun terakhir di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 4.41
Jumlah Perusahaan di Kabupaten Belitung Timur

Tahun	Jumlah
2005	22
2006	30
2007	34
2008	43
2009	47

Sumber Data : Belitung Timur dalam Angka 2009

Berdasarkan hasil analisis data tersebut, metode analisis trend dengan metode kuadrat terkecil dapat dijadikan alternatif yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi proyeksi perkembangan rasio efektifitas dan rasio kontribusi komponen Pajak Daerah di masa yang akan datang dengan memanfaatkan data penerimaan Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya. Pemilihan metode ini juga dapat meminimalisir biaya penelitian. Dengan pendekatan analisis ini dapat disimpulkan bahwa komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah di masa yang akan datang adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Rasio efektifitas pendapatan daerah Kabupaten Belitung Timur selama 5 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2009 rata-rata sebesar 110,23 persen. Capaian rasio efektifitas tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2005 sebesar 118,94 persen dan capaian rasio efektifitas terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 sebesar 106,80 persen. Dengan demikian pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Belitung Timur efektif, karena kontribusi yang diberikan terhadap target yang ingin dicapai lebih dari seratus persen. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik, karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasi sesuai dengan yang telah ditargetkan bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan.
2. Rasio Efisiensi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Belitung Timur selama lima tahun anggaran yaitu dari tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2009 rata-rata sebesar 16,70 persen. Perubahan rasio efisiensi yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu meningkat sebesar 12,31 persen dari tahun

sebelumnya. Pengelolaan PAD di Kabupaten Belitung Timur dapat dikatakan efektif karena realisasi penerimaan PAD lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

3. Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan guna mendukung upaya peningkatan penerimaan Pajak Daerah dimasa yang akan datang adalah komponen Pajak Daerah yang memiliki proyeksi rasio efektifitas dan rasio kontribusi yang positif. Komponen Pajak Daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur adalah Pajak Daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame.

B Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sebaiknya menyusun perencanaan anggaran pendapatan daerah berdasarkan data potensi pendapatan yang mendekati kondisi nyata, meningkatkan sistem pengendalian manajemen pengelolaan pendapatan daerah, mengarahkan peningkatan pendapatan asli daerah pada sumber-sumber yang tidak membebani masyarakat, dan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan Pajak Daerah di masa yang akan datang.
2. Bagi yang berminat untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Belitung Timur, dapat melanjutkan penelitian dengan menggunakan pengukuran mengenai rasio keuangan

daerah yang lain seperti rasio keserasian, rasio penyerapan dana, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan.

UNIVERSITAS TERBUKA



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi.(1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dajan, Anto.(1983). *Pengantar Metode Statistik*. Jakarta : LP3ES.
- Defriyanto. (2005). Peran pejabat bupati dalam pembentukan kabupaten baru (studi penelitian diskriptif kualitatif di Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD*. Yogyakarta
- Devas, Nick.(1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Sebuah Tinjauan Umum*. Jakarta : UI-Press.
- Halim, Abdul.(2002). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul.(2007). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul.(2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Jane, Orpha.(2002). *Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah*. Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.
- Mamesah, D.J.(1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mangkoesebroto, Guritno (1999); *Ekonomi Publik*; edisi 3; Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo.(2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Munir Dasri (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : YPAPL.
- Musgrave, A.Richard dan Musgrave, B.Peggy.(1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- M.Ikhsan.(2007). *Administrasi Keuangan Publik*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Prasetya, Irawan.(2007). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.

- Simanjuntak, Robert.A.(2002). *Transfer Pusat ke Daerah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara dalam Dana Alokasi Umum : Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Erlangga
- BAPPEDA dan BPS.(2008). *Belitung Timur dalam Angka 2007*. Manggar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- BAPPEDA dan BPS.(2009). *Belitung Timur dalam Angka 2008*. Manggar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- BAPPEDA dan BPS.(2010). *Belitung Timur dalam Angka 2009*. Manggar. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2005. Manggar.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2006. Manggar.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2007. Manggar.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008. Manggar.
- Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009. Manggar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 105 tahun 2001 , tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2005 , tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 , tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 1999, tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1999, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003, tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004, tentang *Perbendaharaan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004, tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004, tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

UNIVERSITAS TERBUKA



Lampiran 1

Rincian objek Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Belitung Timur

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
4.1.1	PAJAK DAERAH	
4.1.1.01	Pajak Hotel	DPPKAD
4.1.1.02	Pajak Restoran	DPPKAD
4.1.1.03	Pajak Hiburan	DPPKAD
4.1.1.04	Pajak Reklame	DPPKAD
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	DPPKAD
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	DPPKAD
4.1.1.07	Pajak Parkir	DPPKAD
4.1.1.08	Pajak Pengelolaan Sarang Burung Walet	DPPKAD
4.1.2	RETRIBUSI DAERAH	
4.1.2.01	RETRIBUSI JASA UMUM	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	DINKES & RSUD
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Kesehatan/ Askes	DINKES & RSUD
4.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Capil	DINDUKCAPIL
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	DPU
4.1.2.01.05	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	DISHUB
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	DPPKAD
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	DISHUB
4.1.2.02	RETRIBUSI JASA USAHA	
4.1.2.02.01	Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	DKP
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	DISPERINDAG KOP
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	DISHUB
4.1.2.02.08	Retribusi Jasa Usaha Tempat Pemotongan Hewan	DISTANHUT
4.1.2.02.14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Alat Berat dan Kendaraan Tinja	DPU
4.1.2.02.15	Retribusi Jasa Usaha Lainnya	DKP
4.1.2.03	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	BAG. EKBANG
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	BAG. EKBANG

NOMOR REKENING	JENIS PAJAK/ RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	DISHUB
4.1.2.03.12	Retribusi Izin Usaha di Bidang Perhubungan Darat	DISHUB
4.1.2.03.21	Retribusi di Bidang Perindustrian, Perdagangan & PM	DISPERINDAG KOP
4.1.2.03.22	Retribusi Perizinan Bidang Pertambangan	DISTAMBEN
4.1.3	HASIL PERUSAHAAN MILIK DAERAH & HASIL PENGELOLAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD	DPPKAD
4.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	DPPKAD
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	DPPKAD
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	DPPKAD
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	DKP
4.1.4.13	Penerimaan Lain-lain	DISTANHUT, DISTAMBEN, DPPKAD, DISBUDPAR

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitong Timur (Data diolah)

Lampiran 2

Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2006

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	288.208.710,00
	a. Pembangunan Pos Terpadu Pemantauan PAD Desa Buding	38.494.000,00
	b. Pembangunan Pos Terpadu Pemantauan PAD Desa Gantung	38.500.000,00
	c. Pembangunan Pos Terpadu Pemantauan PAD Desa Nyuruk	38.438.000,00
	d. Pembangunan Pos Terpadu Pemantauan PAD Desa Simpang Tiga	38.445.000,00
	e. Pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Manggar	18.149.430,00
	f. Pendataan Intensifikasi dan Ekstensifikasi terhadap Objek/Subjek Pajak Retribusi Daerah	11.153.130,00
	g. Optimalisasi Pos Jaga dan Pengawasan PAD Kabupaten Belitung Timur	62.797.500,00
	h. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pos Pemantauan PAD Terpadu	42.231.650,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	79.660.000,00
	a. Pengadaan Perangkat Lunak Sistem Administrasi Kependudukan	13.080.000,00
	b. Pengadaan Komputer Server	34.995.000,00
	c. Pengadaan Komputer dan Perangkat Keras	31.585.000,00
3	program pelayanan persampahan	155.788.000,00
	a. Pembangunan TPS Sementara Kecamatan Manggar	68.238.000,00
	b. Pembangunan TPS Sementara Kecamatan Gantung	34.800.000,00
	c. Pembangunan TPS Sementara Kecamatan Kelapa Kampit	34.950.000,00
	d. Pengadaan Gerobak Sampah	17.800.000,00
4	program pelayanan pasar	121.683.600,00
	a. Pembangunan Petak Kios Baru di Pasar Kelapa Kampit	52.283.600,00
	b. Penimbunan Tanah Urug Pasar Kelapa Kampit	29.900.000,00
	c. Pembuatan WC Umum dan Saluran Pembuangan di Pasar Gantung	19.800.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	d. Pembuatan WC Umum dan Saluran Pembuangan di Pasar Kelapa Kampit	19.700.000,00
5	retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)	
6	program sewa bangunan (DKP)	
7	program terminal	
8	Program RPH	
9	Program Alat Berat dan mobil tinja	
10	program perhubungan darat	146.500.000,00
	a. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas di Kabupaten Belitung Timur	62.000.000,00
	b. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan dalam Kota Manggar	84.500.000,00
11	Program perindagkop (SIUP, TDP, TDG dan IUI)	11.000.000,00
	Pembuatan Leaflet Prosedur Perizinan	11.000.000,00
12	Program ijin pertambangan	
13	Program penerangan lampu jalan	226.701.000,00
	a. Penambahan Jaringan Penerangan Jalan Umum	145.346.000,00
	b. Rehabilitasi Jaringan Penerangan Jalan Umum	81.355.000,00
14	Program penunjang pariwisata	457.500.900,00
	a. Pembangunan Pondok Makan di Pantai Nyiur Melambai	57.600.000,00
	b. Pengadaan Bis Pariwisata	399.900.900,00
15	penyertaan modal saham pada bank sumsel	3.500.000.000,00
TOTAL BIAYA		4.987.042.210,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Lampiran 3

Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2007

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	118.450.000,00
	a. Cetak Karcis Kupon Tunai	98.750.000,00
	b. Belanja Hadiah Pajak Hotel dan Restoran	19.700.000,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	82.000.000,00
	a. Pengadaan Blanko KTP dan KK	52.150.000,00
	b. Pengadaan Formulir F.1-01	29.850.000,00
3	program pelayanan persampahan	17.910.000,00
	Pengadaan Gerobak Sampah	17.910.000,00
4	program pelayanan pasar	475.900.000,00
	a. Jasa Konsultasi DED dan Gambar Pasar Kelapa Kampit	34.710.000,00
	b. Jasa Konsultasi DED dan Gambar Pasar Gantung	47.970.000,00
	c. Jasa Konsultasi DED dan Gambar Pasar Manggar	39.720.000,00
	d. Rehabilitasi Petak Kios Pasar Kelapa Kampit 33 Unit	225.040.000,00
	e. Pembuatan Los Ikan Pasar Kelapa Kampit	78.250.000,00
	f. Penimbunan Halaman Belakang Pasar Kelapa Kampit	49.500.000,00
5	retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)	251.140.000,00
	a. Pengadaan Buku KIR, Sticker Samping dan Sticker Hologram	24.350.000,00
	b. Pengadaan Plat Peneng	7.900.000,00
	c. Pengadaan Alat Penguji Kendaraan Bermotor (Timbangan Portable)	218.890.000,00
6	program sewa bangunan (DKP)	
7	program terminal	301.622.000,00
	a. Pembuatan Sumor Bor di Terminal Manggar	14.920.000,00
	b. Pembangunan sembilan petak kios Terminal	179.102.000,00
	c. Pembangunan Taman Terminal	48.840.000,00
	d. Pembangunan Musholah Terminal	58.750.000,00
8	Program Rumah Potong Hewan	164.470.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	a. Perencanaan Teknis Pembangunan Rumah Potong Hewan	41.000.000,00
	b. Pembangunan Pasar Hewan, Sumur dan Sarana Pendukung RPH Mangar	43.970.000,00
	c. Pengadaan Alat IB untuk Sapi	79.500.000,00
9	Program Alat Berat dan mobil tinja	
10	Program perhubungan darat	911.372.000,00
	a. Pengadaan Mobil Pick Up (PATWAL)	298.450.000,00
	b. Pengadaan Sepeda Motor (PATWAL)	119.350.000,00
	c. Pengadaan Rambu Lalu Lintas	94.340.000,00
	d. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	201.007.000,00
	e. Pengadaan APILL/ Lampu Peringatan	112.500.000,00
	f. Pengadaan Marka Jalan	85.725.000,00
11	Program perindagkop (SIUP, TDP, TDG dan IUI)	
12	Program ijin pertambangan	
13	Program penerangan lampu jalan	244.682.176,00
	a. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	120.000.000,00
	b. Rehabilitasi Lampu Jalan di Empat Kecamatan	69.608.000,00
	c. Pengadaan Kotak Panel Lampu Jalan	240.000,00
	d. Pengadaan Lampu Kelapa	6.340.000,00
	e. Pembayaran BP-UJI, PJI	48.494.176,00
14	Program penunjang pariwisata	708.975.000,00
	a. Pengadaan Kapal Motor Wisata	559.500.000,00
	b. Pembangunan Kios Makan di Pantai Nyiur Melambai	74.745.000,00
	c. Pembangunan Kios Makan di Pantai Burung Mandi	74.730.000,00
15	penyertaan modal saham pada bank sumsel	2.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		5.275.811.176,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

Lampiran 4

Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2008

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	370.965.650,00
	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	321.065.650,00
	b. Pengadaan Sistem Komputerisasi Pendapatan Daerah	49.900.000,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	157.205.000,00
	a. Pengadaan Barang Cetak Blanko Kependudukan	9.510.000,00
	b. Pengadaan Barang Cetak Blanko KTP dan KK	98.545.000,00
	c. Pengadaan Barang Cetak Blanko KTP dan KK	49.150.000,00
3	program pelayanan persampahan	596.900.000,00
	a. Pembangunan Pengolahan Sampah TPA	582.000.000,00
	b. Pembangunan TPS Desa Lalang	14.900.000,00
4	program pelayanan pasar	353.611.700,00
	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Pedesaan	353.611.700,00
5	Retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)	
6	Program sewa bangunan (DKP)	675.422.000,00
	Pengadaan Mesin Pabrik Es	675.422.000,00
7	Program terminal	3.549.212,00
	Rehabilitasi Terminal	3.549.212,00
8	Program RPH	949.897.380,00
	a. Pekerjaan Land Clearing	34.876.380,00
	b. Pembangunan Rumah Potong Hewan	798.160.000,00
	c. Supervisi dan Pengawasan Pembangunan Rumah Potong Hewan	39.581.000,00
	d. Pembangunan Rumah Potong Hewan Gantung	77.280.000,00
9	Program Alat Berat dan mobil tinja	
10	Program perhubungan darat	822.377.000,00
	a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	94.340.000,00
	b. Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas	279.972.000,00
	c. Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan	278.356.000,00
	d. Pengadaan Marka Jalan	86.817.200,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	e. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	82.891.800,00
11	program perindagkop (SIUP, TDP, TDG dan IUI)	
12	program ijin pertambangan	
13	Program penerangan lampu jalan	969.685.650,00
	Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana Penerangan Jalan Umum	969.685.650,00
14	Program penunjang pariwisata	74.580.000,00
	Pembuatan Kios Makan di Pantai Nyiur Melambai	74.580.000,00
15	penyertaan modal saham pada bank sumsel	2.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		6.974.193.592,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitang Timur (Data diolah)

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran 5

Rincian biaya yang dikeluarkan untuk membiayai program yang berpengaruh terhadap penerimaan PAD Tahun Anggaran 2009

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah	540.780.050,00
	a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	423.383.500,00
	b. Penanganan PBB (Pendistribusian SPPT PBB, Pendataan dan Penanganan Tunggalan)	117.396.550,00
2	Program pelayanan KTP dan Akte Catatan Sipil	226.405.000,00
	a. Cetak Blanko dan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.710.000,00
	b. Cetak Dokumen Pendukung Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95.695.000,00
3	program pelayanan persampahan	19.800.000,00
	Pembangunan TPS di Desa Kurnia Jaya	19.800.000,00
4	program pelayanan pasar	
5	retribusi pengujian kendaraan bermotor (KIR)	38.600.000,00
	Pengadaan Buku KIR, Sticker Samping dan Sticker Hologram	38.600.000,00
6	program sewa bangunan (DKP)	
7	program terminal	7.861.370,00
	Rehabilitasi Terminal	7.861.370,00
8	Program RPH	168.199.000,00
	a. Jasa Konsultasi UKL/UPL Rumah Potong Hewan	44.750.000,00
	b. Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan	30.119.000,00
	c. Pembangunan Pagar Rumah Potong Hewan	93.330.000,00
9	Program Alat Berat dan mobil tinja	
10	program perhubungan darat	75.866.600,00
	Pengadaan APILL/ Lampu Peringatan	75.866.600,00
11	program perindagkop (SIUP, TDP, TDG dan IUI)	
12	program ijin pertambangan	59.544.050,00
	Penertiban dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Umum (SIPD/KP)	59.544.050,00
13	Program penerangan lampu jalan	329.523.100,00
	a. Pengadaan Lampu Hias Kecamatan Manggar	94.270.000,00
	b. Pengadaan Lampu Hias Taman Kota	49.812.000,00

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	c. Rehabilitasi Lampu Hias Taman Kota	49.311.200,00
	d. Pengadaan Material Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kecamatan Manggar	41.263.000,00
	e. Pengadaan Material Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kecamatan Kelapa Kampit	34.418.900,00
	f. Pengadaan Material Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kecamatan Gantung	34.590.000,00
	g. Pengadaan Material Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Kecamatan Dendang	25.858.000,00
14	Program penunjang pariwisata	174.220.000,00
	a. Pembuatan Kios Souvenir dan Makanan Khas Daerah di Pantai Nyiur Melambai	99.820.000,00
	b. Pembuatan Kios Makan di Pantai Punai	74.400.000,00
15	penyertaan modal saham pada bank sumsel	5.000.000.000,00
TOTAL BIAYA		6.640.799.170,00

Sumber data : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belitung Timur (Data diolah)

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2005 DAN 2004

(Dalam Rupiah)				
Uraian	Anggaran 2005	Realisasi 2005	%	Realisasi 2004 (Unaudited)
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	5.709.850.934,00	5.556.474.742,00	97,32	4.836.586.329,10
Pendapatan Retribusi Daerah	1.016.040.800,00	1.128.955.791,00	110,89	838.129.785,00
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	11.770.361.000,00	13.802.726.899,00	117,27	4.730.282.871,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	18.496.052.734,00	20.488.187.432,00	110,76	10.405.998.985,10
PENDAPATAN TRANSFER				
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
Dana Bagi Hasil Pajak	2.899.992.891,00	11.542.937.155,00	398,03	9.155.165.896,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	6.721.852.709,00	14.421.960.421,00	214,55	8.634.178.842,98
Dana Alokasi Umum	63.902.000.000,00	63.902.000.000,00	100,00	45.810.000.000,00
Dana Alokasi Khusus	9.311.220.000,00	9.311.220.000,00	100,00	4.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	82.835.065.600,00	99.178.117.576,00	119,73	67.599.344.738,98
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Penyesuaian	2.816.490.000,00	2.816.490.000,00	100,00	1.628.368.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (15 s/d 16)	2.816.490.000,00	2.816.490.000,00	100,00	1.628.368.000,00
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.127.587.903,00	5.070.111.890,00	99,05	1.814.569.766,65
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00	3.250.000.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)	7.527.587.903,00	7.470.111.890,00	99,36	5.064.569.766,65
Total Pendapatan Transfer (14+17+21)	93.179.143.603,00	109.473.726.466,00	117,49	74.292.280.605,63
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		2.870.162.920,00		-
Pendapatan Hibah	-	2.870.162.920,00		-
JUMLAH PENDAPATAN (7 +22)	111.675.196.237,00	132.832.046.818,00	118,94	84.698.279.490,73
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	18.087.269.342,21	36.096.262.775,00	73,87	27.568.852.188,95
Belanja Barang	26.655.472.333,00	21.155.117.074,00	79,36	10.490.513.211,00
Hibah	-	538.900.600,00	-	-
Bantuan Sosial	6.081.434.375,00	3.570.327.246,00	58,71	2.412.241.750,00
Jumlah Belanja Operasi (28 s/d 31)	51.805.166.050,21	61.360.607.695,00	75,19	40.471.607.149,95
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	457.521.400,00	137.023.511,00	29,85	411.860.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	7.698.995.100,00	8.468.298.129,00	109,99	6.498.816.600,00
Belanja Gedung dan Bangunan	13.180.487.500,00	10.061.333.272,00	76,34	8.211.958.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	13.262.231.200,00	14.674.719.569,00	110,65	1.021.393.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	185.500.000,00	148.777.660,00	80,20	138.596.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	152.006.302,00	-	-
Jumlah Belanja Modal (34 s/d 39)	34.764.735.200,00	33.642.158.443,00	96,77	14.280.823.600,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	-	0,00	-
Jumlah Belanja Tak Terduga (42 s/d 42)	2.000.000.000,00	-	0,00	-
Jumlah Belanja (32+40+43)	118.369.901.250,21	95.002.766.138,00	80,28	64.762.230.749,95
TRANSFER				
TRANSFER / BAGI HASIL KE DESA				
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	6.442.700.000,00	6.435.626.159,00		3.863.857.528,00
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa (47 s/d 47)	6.442.700.000,00	6.435.626.159,00		3.863.857.528,00
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (44+48)	124.812.601.250,21	101.438.392.297,00	81,27	68.616.088.276,95
SURPLUS / DEFISIT (25-49)	(13.135.405.013,21)	31.393.654.621,00	(239,00)	26.082.191.214,78
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SLPA	24.649.468.021,78	24.649.468.022,00	100,00	817.276.807,00
Penerimaan Kembali Pinjaman dari PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	440.000.000,00	170.422.394,00	-	-
Penerimaan Jaminan Reklamasi	-	94.870.000,00	-	-
Penerimaan Jaminan Kesungguhan	-	437.500.000,00	-	-
Total Penerimaan (63 s/d 66)	25.089.468.021,78	25.352.060.416,00	101,06	817.276.807,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pemberian Pinjaman Jangka Panjang	-	-	-	2.250.000.000,00
Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	-
Transfer Ke Dana Cadangan	1.000.000.000,00	-	0,00	-
Total Pengeluaran (69 s/d 69)	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00	2.250.000.000,00
PEMBIAYAAN NETO (67-61)	23.089.468.021,78	24.352.060.416,00	105,47	(1.432.723.193,00)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (60+62)	9.964.063.008,57	65.745.714.937,00	660,03	24.649.468.021,78

catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

LAPORAN REALISASI APBD

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006

Uraian	Anggaran 2006	Realisasi 2006	%
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH			
Pendapatan Pajak Daerah	7.066.664.990,00	5.334.775.366,35	75,49
Pendapatan Retribusi Daerah	1.454.491.500,00	1.279.683.081,75	89,21
Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	15.448.385.000,00	18.361.207.613,02	118,86
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	23.949.541.490,00	24.975.666.061,12	104,28
PENDAPATAN TRANSFER			
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil Pajak	8.740.977.675,00	14.735.040.603,00	168,57
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	8.191.570.000,00	15.423.821.597,00	188,29
Dana Alokasi Umum	157.854.000.000,00	157.854.000.000,00	100,00
Dana Alokasi Khusus	28.810.000.000,00	28.870.000.000,00	100,21
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)	203.596.547.675,00	216.882.862.200,00	106,53
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya			
Dana Penyusutan	2.749.000.000,00	2.749.000.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	2.749.000.000,00	2.749.000.000,00	100,00
Transfer Pemerintah Provinsi			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4.399.000.000,00	7.353.909.041,69	159,90
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	4.694.586.000,00	3.750.400.000,00	79,36
Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s.d 20)	9.093.586.000,00	11.104.309.041,69	119,17
Total Pendapatan Transfer (14+17+21)	215.439.133.675,00	230.706.111.243,69	106,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah	-	199.000.000,00	-
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	199.000.000,00	-
JUMLAH PENDAPATAN (7+22+25)	239.588.675.165,00	255.881.376.344,32	106,80
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	74.647.968.173,30	52.663.844.954,60	70,50
Belanja Barang	57.137.035.491,80	46.751.059.580,00	81,83
Hibah	-	-	-
Bantuan Sosial	4.504.330.000,00	5.355.938.300,00	119,11
Jumlah Belanja Operasi (29 s.d 32)	136.289.333.665,10	104.775.842.834,60	76,52
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	351.739.172,00	-	0,00
Belanja Perlatan dan Mesin	20.060.481.500,00	16.612.684.100,00	82,81
Belanja Gedung dan Bangunan	41.462.366.700,00	23.071.581.100,00	55,64
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	39.198.100.000,00	36.655.769.198,00	93,51
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.044.460.000,00	1.901.959.000,00	93,03
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	3.820.642.222,00	-
Jumlah Belanja Modal (35 s.d 40)	103.317.347.372,00	82.067.036.320,00	79,43
BELANJA TAK TERDUGA			
Jumlah Belanja (33+41+42)	244.058.703.969,30	186.842.908.955,00	76,55
TRANSFER			
TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE DAERAH			
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Daerah	15.837.900.000,00	11.414.085.600,00	72,07
Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Daerah	15.837.900.000,00	11.414.085.600,00	72,07
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (43+47)	259.896.603.969,30	198.256.994.555,00	76,28
SURPLUS / DEFISIT (26-48)	(20.307.928.804,30)	57.624.381.789,32	(283,79)
PEMBIAYAAN			
PEMERINTAHAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan SLPA	55.213.544.937,00	55.745.714.937,05	100,96
Penerimaan Pengembalian Pinjaman dari PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	400.000.000,00	219.430.254,00	49,83
Jaminan Reklamsi	94.670.000,00	1.883.802.798,00	1989,86
Jaminan Kesanggupan	437.500.000,00	-	-
Total Pembiayaan (52 s.d 55)	56.145.114.937,00	57.848.947.989,05	102,96
SELISIRAN PEMBIAYAAN			
Penggunaan Modal	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00
Transfer Ke Dana Cadangan	2.000.000.000,00	-	-
Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	203.443.632,00	26.508.975,00	13,03
Pengeluaran Jaminan Kesanggupan	437.500.000,00	187.500.000,00	42,86
Pengeluaran Jaminan Reklamsi	94.670.000,00	-	-
Salang Lain-lain-TKID	-	605.160.000,00	-
Total Pengeluaran (56 s.d 63)	6.235.613.632,00	4.322.168.975,00	69,31
PEMBIAYAAN NETO (56-64)	49.909.501.305,00	53.526.798.614,05	107,26
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (49+65)	29.642.172.506,70	111.159.148.303,37	375,00

2. Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 dan 2006

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2007	Realisasi 2007
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.652.000.000,00	6.133.374.625,02
4	Pendapatan Retribusi Daerah	2.976.198.000,00	2.820.929.609,75
5	Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	150.000.000,00	440.210.854,78
6	Lain-lain PAD yang sah	18.013.300.000,00	22.525.190.083,85
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	28.791.498.000,00	31.919.705.173,40
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	12.537.362.800,00	19.186.647.691,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	12.799.425.700,00	27.019.332.068,00
12	Dana Alokasi Umum	192.853.000.000,00	192.853.000.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	34.907.000.000,00	34.907.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)	253.096.788.500,00	273.965.979.759,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		
16	Dana Penyesuaian	-	704.652.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	-	704.652.000,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi		
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.155.000.000,00	6.948.356.975,19
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	5.155.000.000,00	6.948.356.975,19
21	Total Pendapatan Transfer (14+17+20)	258.251.788.500,00	281.618.988.734,19
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
23	Pendapatan Lainnya	2.000.000.000,00	1.659.673.000,00
24	Pendapatan Hibah	-	164.343.500,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.000.000.000,00	1.824.016.500,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)	289.043.286.500,00	315.362.719.407,59
27	BELANJA		
28	BELANJA OPERASI		
29	Belanja Pegawai	104.765.252.252,24	74.468.630.835,00
30	Belanja Barang	59.887.882.386,80	42.550.252.792,00
31	Hibah	-	-
32	Bantuan Sosial	7.057.900.000,00	4.370.738.000,00
33	Bantuan Keuangan	16.522.957.400,00	-
34	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d 33)	188.233.992.039,04	121.389.621.627,00
35	BELANJA MODAL		
36	Belanja Tanah	1.105.000.000,00	331.023.000,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	25.527.399.216,00	24.109.444.880,00

38	Belanja Gedung dan Bangunan	49.584.492.801,48	41.090.646.000,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	42.246.404.176,00	39.588.441.240,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	3.611.275.000,00	3.461.080.300,00
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
42	Jumlah Belanja Modal (36 s.d 41)	122.074.571.193,48	108.580.695.420,00
43	BELANJA TAK TERDUGA	1.500.000.000,00	928.088.936,45
44	JUMLAH BELANJA (34+42+43)	311.808.563.232,52	230.898.405.983,45
45	T R A N S F E R		
46	TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA		
47	Bagi Hasil Pajak	568.150.000,00	-
48	Bagi Hasil Retribusi	258.273.700,00	-
49	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	16.306.394.975,00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa (47 s/d 49)	826.423.700,00	16.306.394.975,00
51	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (44+50)	312.634.986.932,52	247.204.800.958,45
52	SURPLUS / (DEFISIT) (26-51)	(21.591.700.432,52)	68.157.909.449,14
53	P E M B I A Y A A N		
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
55	Penggunaan SILPA	111.159.140.203,37	111.159.140.203,37
56	Penerimaan Pengembalian Pinjaman dari PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk	400.000.000,00	372.374.590,00
57	Jaminan Reklamasi	-	-
58	Jaminan Kesungguhan	-	-
59	Total Penerimaan (55 s/d 58)	111.559.140.203,74	111.531.514.793,37
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
61	Pembentukan Dana Cadangan	16.000.000.000,00	6.000.000.000,00
62	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
63	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	-	-
64	Pengeluaran Jaminan Kesungguhan	-	250.000.000,00
65	Pengeluaran Jaminan Reklamasi	-	1.978.472.398,00
66	Piutang lain-lain TKI UC	-	-
67	Total Pengeluaran (61 s/d 66)	18.000.000.000,00	10.228.472.398,00
68	PEMBIAYAAN NETO (59-67)	93.559.140.203,74	101.303.042.395,37
69	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (52+68)	69.967.439.771,22	169.460.951.844,51

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Manggar, Juli 2008
 Bupati Belitang Timur,

 Hukmah Efendi, B.Sc.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008 dan 2007

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2008	Realisasi 2008	Persentase	Realisasi 2007
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	6.959.745.500,00	6.042.586.288,00	115,56	6.133.374.625,02
4	Pendapatan Retribusi Daerah	3.229.850.000,00	4.385.333.527,50	135,78	2.820.929.609,75
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	150.000.000,00	990.627.565,28	660,42	440.210.854,78
6	Lain-lain PAD yang sah	20.052.800.000,00	21.797.368.996,31	108,70	22.525.190.083,35
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	30.392.395.500,00	35.215.916.375,09	115,87	31.919.705.173,40
8	PENDAPATAN TRANSFER				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	18.694.320.000,00	20.778.729.867,00	111,15	19.166.647.691,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.971.540.000,00	42.089.939.114,00	168,55	27.019.332.068,00
12	Dana Alokasi Umum	220.654.060.000,00	220.654.059.000,00	100,00	192.853.000.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	40.623.000.000,00	40.623.000.000,00	100,00	34.907.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d 13)	304.942.920.000,00	324.145.727.981,00	106,30	273.965.979.759,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
16	Dana Penyesuaian	-	744.055.000,00	-	704.652.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	-	744.055.000,00	-	704.652.000,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.355.000.000,00	9.471.916.613,55	176,87	6.948.356.975,13
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s.d 20)	5.355.000.000,00	9.471.916.613,55	176,87	6.948.356.975,13
21	Total Pendapatan Transfer (14+17+20)	310.297.920.000,00	334.617.644.594,55	107,75	281.618.988.734,19
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
23	Pendapatan Hibah	2.693.320.000,00	4.874.121.300,00	180,97	1.659.673.000,00
24	Pendapatan Lainnya	1.537.700.000,00	1.495.871.000,00	97,28	164.343.500,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	4.231.020.000,00	6.369.992.300,00	150,55	1.824.016.500,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)	344.921.395.500,00	375.947.173.324,94	109,00	315.362.710.407,59
27	BELANJA				
28	BELANJA OPERASI				
29	Belanja Pegawai	150.291.937.232,99	106.198.002.448,00	70,66	74.468.630.835,00
30	Belanja Barang	76.231.191.143,00	56.533.639.200,00	74,16	42.550.252.792,00
31	Hibah	6.251.300.000,00	4.642.400.000,00	74,26	-
32	Bantuan Sosial	3.570.000.000,00	3.034.661.000,00	85,00	4.370.738.000,00
33	Belanja	16.695.214.000,00	-	0,00	-
34	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d 33)	253.839.842.375,99	170.408.702.648,00	67,34	121.380.621.627,00
35	BELANJA MODAL				
36	Belanja Tanah	1.203.796.300,00	426.649.380,00	35,44	331.083.000,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	43.192.221.500,00	36.493.374.505,00	84,49	24.109.444.880,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	55.631.497.388,00	49.882.188.200,00	89,85	41.090.646.000,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.916.321.502,00	56.294.292.500,00	89,47	39.588.441.240,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.518.110.000,00	6.405.416.100,00	98,27	3.461.090.300,00
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
42	Jumlah Belanja Modal (36 s.d 41)	169.461.946.690,00	149.201.938.685,00	88,28	108.580.685.420,00
43	BELANJA TAK TERUGA	2.000.000.000,00	-	-	928.048.938,45
44	Jumlah Belanja (34+42+43)	424.501.589.065,99	320.010.633.333,00	75,36	230.898.405.983,45
45	TRANSFER				
46	TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA				
47	Bagi Hasil Pajak	661.586.160,00	380.089.254,41	57,45	-
48	Bagi Hasil Retribusi	254.700.000,00	173.796.313,55	68,24	-
49	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	-	16.659.213.500,00	-	18.308.394.975,00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa (47 s.d 49)	916.286.160,00	17.213.098.067,96	1878,57	18.308.394.975,00
51	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (44+50)	425.417.875.215,99	337.223.732.400,96	79,27	249.206.800.958,45
52	SURPLUS / (DEFISIT) (26-51)	(80.496.489.715,99)	38.723.440.923,98	-48,11	66.157.909.449,14

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2008	Realisasi 2008	Persentase	Realisasi 2007
63	PEMBIAYAAN				
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
65	Penggunaan SILPA	168.941.944.945,78	169.011.992.802,51	100,04	111.159.140.203,37
66	Penerimaan Pengembalian Piutang dari PT.Telekomunikasi Indonesia,Tbk	440.000.000,00	483.077.103,00	109,79	372.374.590,00
67	Jaminan Reklamasi	-	-	-	-
68	Jaminan Kesungguhan	-	-	-	-
69	Penerimaan PFK	-	-	-	-
70	Total Penerimaan (65 s.d 69)	169.381.944.945,78	169.495.069.905,51	78,89	111.531.514.793,37
71	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
72	Pembentukan Dana Cadangan	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	100,00	6.000.000.000,00
73	Penyerahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
74	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	645.177.369,00	590.577.097,00	91,54	-
75	Pengeluaran Jaminan Kesungguhan	-	-	-	250.000.000,00
76	Pengeluaran Jaminan Reklamasi	-	-	-	1.978.472.398,00
77	Piutang lain-lain YKI DO	-	-	-	-
78	Pinjaman Modal Kepada UMKM	4.600.000.000,00	3.762.000.000,00	81,05	-
79	Pengeluaran PFK	-	-	-	-
80	Total Pengeluaran (72 s.d 79)	15.645.177.369,00	15.352.577.097,00	98,13	10.228.472.398,00
81	PEMBIAYAAN NETO (60-70)	153.736.767.576,78	154.142.492.808,51	100,28	101.303.042.395,37
82	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (82-71)	73.240.277.880,78	192.865.833.732,49	263,33	169.450.951.844,51

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Manggar, Mei 2009
BUPATI BELITUNG TIMUR

HY. MIRUL EFENDI, SE

II. Laporan Keuangan Pokok
Laporan Realisasi APBD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 dan 2008

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2009	Realisasi 2009 Audited	%	Realisasi 2008 Audited
1	PENDAPATAN	5.1.4				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.4.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.4.a.1	7.238.010.100,00	8.002.514.954,00	110,59	8.042.586.286,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.4.a.2	2.905.203.150,00	4.529.243.253,00	155,90	4.385.333.527,50
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dilikuidasi	5.1.4.a.3	900.000.000,00	1.913.957.165,82	212,66	990.627.565,28
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.4.a.4	10.913.367.076,80	19.485.982.707,47	115,21	21.797.368.996,31
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		27.954.580.326,80	33.931.398.106,29	121,38	35.215.916.375,09
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.4.b				
9	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	5.1.4.b.1				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.4.b.1.1	15.532.800.000,00	25.093.095.890,00	161,55	20.778.729.867,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.4.b.1.2	24.918.430.000,00	30.558.284.429,00	122,64	42.089.839.114,00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.4.b.1.3	218.123.874.000,00	218.121.874.000,00	100,00	220.854.059.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.4.b.1.4	38.289.000.000,00	38.781.000.300,00	100,00	40.623.000.000,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		296.861.904.000,00	312.674.254.319,00	105,12	324.145.727.981,00
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.4.c				
16	Dana Penyesuaian		1.970.341.000,00	5.534.264.000,00	280,88	744.055.000,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya		1.970.341.000,00	5.534.264.000,00	280,88	744.055.000,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi	5.1.4.d				
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		9.512.539.841,40	10.148.911.822,91	106,80	9.471.481.668,85
20	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19)		9.512.539.841,40	10.148.911.822,91	106,80	9.471.481.668,85
21	Total Pendapatan Transfer (14+17+20)		308.344.784.841,40	327.747.431.941,91	106,28	334.361.264.649,85
22	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.4.e				
23	Pendapatan Hibah					4.874.121.300,00
24	Pendapatan Lainnya		2.086.950.000,00	1.484.079.000,00	71,11	1.495.871.000,00
25	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah (23 s.d. 24)		2.086.950.000,00	1.484.079.000,00	71,11	6.369.992.300,00
26	JUMLAH PENDAPATAN (7+21+25)		338.386.315.167,90	363.162.909.042,20	107,32	376.947.173.324,94
27	BELANJA	5.1.5				
28	BELANJA OPERASI	5.1.5.a				
29	Belanja Pegawai	5.1.5.a.1	199.890.360.972,00	140.899.228.054,00	70,49	106.198.002.448,00
30	Belanja Barang	5.1.5.a.2	86.459.207.242,00	85.234.600.764,00	75,45	58.533.839.200,00
31	Hibah	5.1.5.a.3	24.116.300.000,00	22.200.626.000,00	92,06	4.842.400.000,00
32	Bantuan Sosial	5.1.5.a.4	3.970.000.000,00	4.395.861.200,00	110,71	3.034.661.000,00
33	Bantuan Keuangan Masyarakat Desa	5.1.5.a.5	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	100,00	-
34	Jumlah Belanja Operasi (29 s.d. 33)		324.735.868.214,00	243.130.315.018,00	74,87	170.408.702.648,00
35	BELANJA MODAL	5.1.5.b				
36	Belanja Tanah	5.1.5.b.1	935.000.000,00	575.354.946,00	61,54	428.649.380,00
37	Belanja Perlengkapan dan Mesin	5.1.5.b.2	34.291.099.700,00	28.593.220.822,00	83,38	38.493.374.505,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.5.b.3	51.750.748.250,00	44.204.074.327,00	85,42	49.982.198.200,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.5.b.4	79.821.347.750,00	73.122.427.350,00	91,61	56.294.292.500,00
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.5.b.5	3.109.374.380,00	2.278.683.900,00	73,28	6.405.416.100,00
41	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.1.5.b.6	-	-	-	-
42	Jumlah Belanja Modal (36 s.d. 41)		169.907.568.080,00	148.773.761.345,00	87,56	149.601.930.885,00
43	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.5.c	2.000.000.000,00	-	-	-
44	JUMLAH BELANJA (34+42+43)		496.643.436.294,00	391.904.076.363,00	78,91	320.010.633.333,00

No	Uraian	Ref	Anggaran 2009	Realisasi 2009 Audited	%	Realisasi 2008 Audited
45	TRANSFER	5.1.6				
46	TRANSFER / BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA	5.1.6.a				
47	Bagi Hasil Pajak	5.1.6.a.1	723.601.010,00	331.892.906,00	45,87	380.069.254,41
48	Bagi Hasil Retribusi	5.1.6.a.2	290.520.315,00	191.560.002,00	65,94	173.798.313,55
49	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa	5.1.6.a.3	-	-	-	16.659.213.500,00
50	Jumlah Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa (47 s.d. 49)		1.014.121.325,00	523.452.908,00	51,82	17.213.089.067,96
51	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (44+50)		497.657.657.619,00	392.427.629.271,00	78,85	337.223.732.400,96
52	SURPLUS / (DEFISIT) (26-51)		(169.271.242.451,10)	(29.264.620.228,80)	18,37	38.723.440.923,96
53	PEMBIAYAAN	5.1.7				
54	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.7.a				
55	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya	5.1.7.a.1	192.382.858.629,49	192.865.933.732,42	100,25	169.011.982.802,51
56	Penerimaan Pengembalian Pinjaman dari PT.Telkom,Tbk	5.1.7.a.2	483.077.103,00	399.677.010,00	82,74	483.077.103,00
57	Penerimaan Pengembalian Pinjaman UMKM	5.1.7.a.3	-	1.097.836.000,00	-	-
58	Total Penerimaan (55 s.d 57)		192.865.933.732,49	194.363.246.742,49	100,78	169.495.069.906,51
59	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.7.b				
60	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.7.b.1	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	9.000.000.000,00
61	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.7.b.2	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
62	Pembayaran Hutang Pihak Ketiga	5.1.7.b.3	1.033.127.894,75	961.375.738,10	85,33	590.577.097,00
63	Pinjaman Modal Kepada UMKM	5.1.7.b.4	2.000.000.000,00	1.572.000.000,00	78,60	3.762.000.000,00
64	Total Pengeluaran (60 s.d 63)		23.033.127.894,75	22.563.375.738,10	97,93	15.352.577.097,00
65	PEMBIAYAAN NETO (58-64)		169.832.805.337,74	171.806.371.004,39	101,16	154.142.492.808,51
66	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (52+66)		10.561.575.385,64	142.641.750.775,59	1.349,83	192.865.933.732,49

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

40562.pdf

Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar - Gantung
Telp./Fax. 0719 - 91001 Manggar 33472

SURAT IZIN
NOMOR : 548/151.4/BKD /I/2010

TENTANG
Izin Melakukan Penelitian

Dasar : Surat dari Sdr. HANAFI, SE tanggal 24 Maret 2010 tentang Permohonan Izin Melakukan Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
N a m a : HANAFI, SE
Nomor Mahasiswa : 015535698
Universitas : Universitas Terbuka
Program : Pasca Sarjana
Jurusan : Magister Administrasi Publik
Untuk : Melakukan Penelitian sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Pasca Sarjana.
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
Mulai Penelitian : 2 Juni 2010 s/d 20 Juli 2010
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Belitung Timur
2. Inspektorat Kab. Belitung Timur.

Dikeluarkan di Manggar
Pada tanggal 27 Mei 2010

Ag. BUPATI BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Belitung Timur (sebagai laporan).
2. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang
5. Yang bersangkutan.

BERITA ACARA
PENINJAUAN LAPANGAN TIM TERPADU
DALAM RANGKA PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Pada hari Ini Sabtu Tanggal Dua puluh tujuh Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Belitung, Tim Terpadu Peninjauan Lapangan yang terdiri dari beberapa instansi terkait menyatakan bahwa telah melakukan peninjauan lapangan dalam rangka persiapan pemekaran dan pembentukan daerah otonom Belitung Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Belitung, pada tanggal 25 s/d 27 Juli 2002 dengan kegiatan dan hasilnya secara garis besar sebagai berikut :

A. Keanggotaan Tim

Tim Terpadu terdiri dari :

1. Ir. Suwarno P. Rahardjo MSc. dari Ditjen PUM Departemen Dalam Negeri, sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Drs. Suparman dari Ditjen OTDA Departemen Dalam Negeri, sebagai Sekretaris merangkap anggota.
3. Suminto Marlono SH dari Komisi II DPR-RI, sebagai anggota.
4. Letkol. CKU, Idris Mahidin dari Departemen Hankam, sebagai anggota.
5. Drs. Aca Trosnarasa dari Setjen Depdagri, sebagai anggota,
6. Drs. Lukman Nul Hakim Msi, dari Ditjen Bangda Depdagri,
7. Ir. Tri Patnasari Msi, dari Bakosurtanal, sebagai anggota
8. Asri Ernawati SH. dari Setneg, sebagai anggota.
9. Nugroho Iman Santosa SE, NPM dari Departemen Keuangan sebagai anggota,
10. Ir. Edison Silaen Dipl. Ph. dari Ditjen OTDA Depdagri sebagai anggota,
11. Drs. Pudji Wahono, dari CRAIS, sebagai anggota.

B. Kegiatan,

1. Ekspose oleh ketua Tim Terpadu dan Bupati Kabupaten Belitung yang dihadiri oleh seluruh jajaran Pemda, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Belitung, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Undangan lainnya serta Kepala Badan Kesbang dan Linmas mewakili Gubernur Bangka-Belitung, yang dilanjutkan dengan tanya jawab bertempat di aula Pemda Kabupaten Belitung,
2. Kunjungan Tim Terpadu yang didampingi oleh Bupati, Sekda, Ketua DPRD, jajaran Pemda ke Calon Ibu Kota kabupaten Belitung Timur dengan kegiatan;
 - Paparan mengenai rencana pembentukan kabupaten Belitung Timur bertempat di kecamatan Manggar,
 - Tanya jawab,
 - Peninjauan lokasi calon Kantor sementara Bupati dan Kantor sementara DPRD Kabupaten Belitung Timur.
3. Klarifikasi dan Validasi Data dengan seluruh instansi terkait di Mabab dan di Ruang sidang Pemda Kabupaten Belitung.

- Mengingat besarnya potensi yang ada di sektor perikanan dan kelautan, serta peluangnya untuk menjadi pusat pengembangan kelautan di Indonesia Bagian Barat, maka perlu dikembangkan pula **pusat pengembangan industri kelautan**.
- Mengingat potensi galian tambang yang dimiliki (Galian C), adanya pelabuhan yang dimiliki, serta lokasinya yang strategis, maka perlu **dikembangkan jasa kepelabuhanan dan kawasan industri terkait**.

5. Keamanan dan Potensi Kerawanan/Ketegangan Sosial

Dari kondisi yang ada sekarang ini, wilayah calon Kabupaten Belitung Timur (Polsek Kec. Manggar, Kec. Kelapa Kampit, Kec. Gantung dan Kec. Dendang) ternyata relatif aman, dimana potensi kerawanan dan ketegangan sosial, serta kriminalitas masih rendah.

Untuk ke depan, jika telah terbentuk Kabupaten yang definitif **perlu ditingkatkan satuan Polri dengan membentuk Polres dan mendirikan Pos Polairud yang dilengkapi dengan kapal patroli**.

Untuk pertahanan negara masih bisa di Back Up oleh satuan TNI yang ada (Kodim 0414/Belitung, Lanud Tanjungpandan dan Lanal Pangkal Pinang).

6. Legalitas/Produk Hukum Pembentukan dan Pembagian Wilayah.

Pembentukan kecamatan yang direncanakan masuk wilayah calon kabupaten Belitung Timur adalah kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Kelapa Kampit dan kecamatan Dendang.

Kecamatan Manggar dan Kecamatan Gantung pembentukannya didasarkan pada UU. No. 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.4 tahun 1956 tentang pembentukan daerah tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan.

Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Dendang pembentukannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1986 tanggal 24 September 1986.

Desa-desa yang masuk dalam wilayah masing-masing kecamatan tersebut di atas ternyata sudah mengalami pemekaran/penambahan, namun belum didukung dengan data yang kuat. (Keputusan Gubernur Sumsel)

Demi tertib administrasi pemerintahan dan menghindari adanya kemungkinan terjadinya perselisihan perlu segera diterbitkan **Perda tentang pemekaran/penataan wilayah kecamatan yang bersangkutan**.

7. Kesiapan Sarana dan Prasarana

- a. Pusat pemerintahan calon Kabupaten Belitung Timur sementara menggunakan Gedung Bangunan Ex PT. Timah yang sudah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Belitung, dengan catatan :

- **Perlu direhab/direnovasi dalam tahun anggaran 2002.**
- **Perlu segera diproses status hukumnya (hak kepemilikan) sekarang-kurangnya dalam bentuk akta dan/atau dalam bentuk sertifikat selambat-lambatnya tahun 2003.**

1. Potensi ekonomi.

Potensi ekonomi utama yang diandalkan oleh calon kabupaten Belitung Timur adalah pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, pariwisata serta pertambangan terutama galian c (kwarsa dan kaolin).

Untuk menggali dan mengelola potensi ekonomi perlu segera diambil langkah-langkah strategis antara lain *meningkatkan kemampuan SDM dan menarik investor baik PMA maupun PMDN.*

2. Sumber Keuangan dan Kemampuan Pembiayaan.

Secara umum, dalam tiga tahun terakhir perhitungan APBD Kabupaten Belitung (2000 dan 2001) dan RAPBD tahun 2002, terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mengalami penurunan dari 12,08 % pada TA 2000 (realisasi) menjadi 10,78 % pada TA 2002 (Anggaran), sementara proporsi transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah mengalami peningkatan dari 67,96 % pada TA 2000 menjadi 80,31 % pada TA 2002.

Untuk meningkatkan kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah diharapkan mampu *mengoptimalkan sumber-sumber keuangan yang berasal dari daerah seperti efektifitas perpajakan dan retribusi daerah.*

Dalam hal Calon Kabupaten Belitung Timur telah disetujui pembentukannya, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dana senilai Rp. 1 milyar. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pembuatan pernyataan komitmen Gubernur secara tertulis.

3. Kondisi SDM dan Kelembagaan Daerah

Dari data kepegawaian, jumlah pegawai negeri di Kabupaten Belitung sejumlah 3824 orang, terbagi di Kabupaten Belitung 2797 orang dan calon Kabupaten Belitung Timur 1027 orang.

Dari PNS di Calon Kabupaten Belitung Timur sejumlah 1027 orang diantaranya 78 orang pegawai kecamatan dan 949 guru, pegawai cabang Dinas Pendidikan dan Pegawai Puskesmas. Dengan demikian pegawai yang ada di Calon Kabupaten Belitung Timur perlu didukung dari pegawai Kabupaten Belitung dan/atau dari luar Kabupaten Belitung Timur.

Pemerintah Kabupaten Belitung perlu *melakukan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan organisasi calon pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan prinsip ramping struktur kaya fungsi*, dan direncanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Strategi Pengembangan Daerah

- Mengingat keterbatasan keuangan daerah dan besarnya potensi daerah di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, seperti adanya areal persawahan yang luas di Danau Nujau dan sarana irigasi (bendungan). Pka di sungai Lenggang maka untuk jangka panjang perlu dikembangkan *pembangunan sektor pertanian dalam artian luas (dalam jangka panjang) dan tanaman pangan (jangka pendek)*

- b. Lokasi/Tapak tilas calon pusat pemerintahan telah dicadangkan tanah negara seluas kurang lebih 500 hektar di desa Lalang kecamatan Manggar, dengan catatan :

- *Perlu segera dilakukan penunjukan lokasi oleh Bupati Belitung dan ditetapkan dalam keputusan.*
- *Perlu segera ditindak lanjuti usulan perolehan hak dan pembebasan tanah dari para penggarap yang ada, paling lambat bulan Oktober 2002, oleh Bupati Belitung, dan ditindaklanjuti proses penyelesaian hak atas tanah tersebut atas nama Kabupaten Belitung Timur.*

8. Lokasi Ibu Kota dan Rentang Kendali

- a. Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Belitung Timur di Kecamatan Manggar mendapat dukungan penuh dari masyarakat 4 (empat) Kecamatan (Kecamatan Manggar, Kecamatan Dendang, Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Gantung) dan sesuai dengan keputusan DPRD Kabupaten Belitung.
- b. Lokasi Pusat Pemerintahan (Usulan) di Kecamatan Manggar letaknya cukup strategis, memiliki akses yang baik dilihat dari sarana jalan, mudah dijangkau oleh masyarakat dari desa dan kecamatan lainnya, memungkinkan dicakup pelayanan dengan catatan *perlu didukung dengan memperbanyak sarana angkutan umum.*

9. Cakupan dan Batas Wilayah

Deliniasi garis batas administrasi wilayah antara kabupaten Belitung Induk dari calon kabupaten Belitung Timur, batas-batas kecamatan dan batas desa (sebagian besar bukan merupakan batas alam sungai) dapat diidentifikasi pada peta tata ruang wilayah kabupaten Belitung tahun 2000 - 2010, skala 1 : 100.000.

Penetapan nama pulau dan pulau-pulau kecil (189 pulau) pada tiap desa/kecamatan sudah ditetapkan dengan SK Bupati tingkat II Belitung nomor : 0944/SK/Bapada/1994, tanggal 21 Desember 1994.

Guna mengantisipasi permasalahan/kasus batas wilayah di masa mendatang, pendefinisian garis batas administrasi secara fisik di lapangan perlu ditegaskan.

Pendefinisian garis batas administrasi secara fisik di lapangan perlu ditegaskan, guna mengantisipasi permasalahan/kasus batas wilayah di masa mendatang.

10. Pembagian dan Status Aset

Cukup banyak aset daerah Kabupaten Belitung yang berada di Calon Kabupaten Belitung Timur, antara lain tanah bangunan ex PT. Timah yang diindikasikan berdasarkan kompensasi maupun hibah, aset lain seperti Kantor Camat, Kantor Desa, PDAM dan lainnya yang akan diserahkan kepada Calon Kabupaten Belitung Timur, dengan catatan :

- Aset daerah tersebut sampai saat ini belum diperdakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung sehingga *perlu ditetapkan dalam Perda.*
- Memperhatikan butir 1 diatas, agar segera *dilakukan inventarisasi aset daerah yang akan diserahkan dan dituangkan dalam keputusan Bupati.* Sementara itu aset daerah lainnya yang berada di Kabupaten Belitung (Induk), perlu diperdakan karena sangat diperlukan untuk tertib administrasi aset.

Dalam penyelesaian penyerahan aset daerah; agar *memperhatikan aspek keseimbangan agar tidak mengurangi kemampuan daerah induknya*, perlu dilakukan koordinasi, kerjasama dalkam melakukan inventarisasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Calon Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan prinsip kesetaraan dan Musyawarah Mufakat.

11. Kondisi Sosial Politik

Kondisi Sosial Politik pada umumnya aman, tertib dan terkendali yang pada saat ini dapat dibuktikan dengan adanya partisipasi masyarakat dan partai politik yang bersama-sama menjalin hubungan yang harmonis sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara kondusif. Keributan-keributan yang tidak diinginkan relatif tidak terjadi dan semua gejolak dapat segera diatasi. *Kondisi yang baik tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan terutama dalam mengantisipasi perkembangan perubahan keanggotaan DPRD apabila pembentukan Calon Kabupaten Belitung Timur mendapatkan persetujuan.*

Demikian berita acara ini dibuat sebagai gambaran pokok hasil peninjauan lapangan. Mengenai kelengkapan data dan penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Buku Hasil Penelitian/Kajian terlampir.

Tanjungpandan,
27 Juli 2002

Tim Terpadu Peninjauan Lapangan

1. Ir. Suwarno P. Rahardjo MSc.
2. Drs. Suparman
3. Suminto Martono SH
4. Letkol. CKU, Idris Mahidin
5. Drs. Aca Tresnarasa
6. Drs. Lukman Nui Hakim Msi
7. Ir. Tri Patmasari Msi
8. Asri Ernawati SH
9. Nugroho Iman Santosa SE
10. Ir. Edison Silaen Dipl. Ph
11. Drs. Pudji Wahono

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mengetahui,

BUPATI BELITUNG

KETUA DPRD
KABUPATEN BELITUNG